

REFLEKSI EMPAT TAHUN REFORMASI

Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi

INTISARI LOKAKARYA NASIONAL SOSIAL FORESTRI
Cimacan, 10 - 12 September 2002

©2003 oleh CIFOR dan LATIN
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Diterbitkan tahun 2003
Dicetak oleh SMK Grafika Desa Putera, Indonesia

ISBN 979-3361-08-5

Diterbitkan oleh:
Center for International Forestry Research (CIFOR)
Alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16880 Indonesia
Tel: +62 (0251) 622622 Fax: +62 (0251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: <http://www.cifor.cgiar.org>

Layout: LATIN dan CIFOR
Ilustrasi cover: Sudrajat, LATIN
Ilustrasi dalam: Komaruddin, CIFOR

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
PEMBUKAAN	
Kecenderungan Sosial Forestri di Dunia	vii
REKOMENDASI LOKAKARYA NASIONAL	ix
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Isi Prosiding	3
SEJARAH SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA	5
SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA	9
Prinsip-prinsip Sosial Forestri	9
Ragam Inisiatif Sosial Forestri	12
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA	21
Masalah Mendasar dari Kebijakan Nasional	22
Masalah dalam Desentralisasi dan Kepastian Ruang Kelola Masyarakat	23
Masalah Institusi Lokal dan Proses Pembelajaran Bersama	23
Masalah Koordinasi dan Keselarasan Kerja Inisiator	24
STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA	25
Prasyarat yang Harus Disiapkan	25
Strategi Pengembangan Sosial Forestri di Indonesia	27
Peran Masing-masing Stakeholder dalam Pengembangan Sosial Forestri	31
KESIMPULAN	33

LAMPIRAN	34
Lampiran 1. Alat (<i>tools</i>) Pengembangan Sosial Forestri	35
Lampiran 2. Kebijakan dan Program Sosial Forestri yang Dikembangkan oleh Stakeholder (Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Donor)	39
Lampiran 3. Daftar Peserta	42
Lampiran 4. Jadwal Lokakarya	63

UCAPAN TERIMA KASIH

Prosiding dan Lokakarya Nasional Sosial Forestri (SF) ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan dan kerjasama berbagai pihak, baik perorangan maupun lembaga. Pertama-tama, kami ingin sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai selama Lokakarya Nasional Sosial Forestri ini berlangsung. Berbagai pengalaman yang telah diungkap dalam mengembangkan sosial forestri, baik di tataran praktis maupun konseptual, sangat berarti bagi para pengambil kebijakan dan para penggiat sosial forestri. Terima kasih kepada Ujjwal Pradhan, Tri Nugroho, Diah Rahardjo, Yurdi Yasmi, Herry Purnomo, Eva Wollenberg, Moira Moeliono, Tony Djogo, Sih Yuniati, Muayat Ali Muhsi, Martua Sirait dan Arif Aliadi serta anggota Steering Committee (SC) yang telah banyak memberi arahan dalam lokakarya ini. Steering Committee (SC) juga berperan sebagai fasilitator selama Lokakarya berlangsung, bahkan juga berperan sebagai penggalang dana.

Lokakarya Nasional Sosial Forestri juga tidak akan dapat berlangsung dengan lancar tanpa keterlibatan para fasilitator. Kami ucapkan terima kasih kepada para fasilitator, khususnya yang tidak terlibat sebagai anggota Steering Committee (SC) yaitu Wimar Witelara, Iwan Tjitradjaja, Suhardi Suryadi, Erna Rosdiana, San Afri Awang, Nonet Royo, Suporahardjo, Wibowo A. Djatmiko, Noviar dan Stepi Hakim.

Secara khusus, terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan kontribusinya dalam merangkum, mereview, dan mengkritisi hasil-hasil diskusi selama lokakarya berlangsung, yaitu Dr. Tania Li, Dr. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Dr. Mustafa Agung Sardjono dan Suhardi Suryadi.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Direktur Jenderal CIFOR, Dr. David Kaimowitz dan Dr. Yvan Biot, Program Koordinator DfID-MFP yang secara terus menerus mendorong dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya lokakarya ini. Dr. Ravi Prabhu dari ACM CIFOR juga banyak memberikan masukan dan arahan, ucapan terima kasih juga perlu disampaikan kepada beliau.

Lokakarya Nasional Sosial Forestri ternyata menjadi lebih hidup karena dukungan media SF Info, media harian yang bisa dinikmati setiap pagi oleh para peserta lokakarya, dan memang diterbitkan hanya untuk kepentingan lokakarya semata. Untuk itu, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim SF Info, yakni Dicky Lopulalan, M. Djauhari, Siti Chadijah (Heda), Adi dan Alin Fitriyani.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada panitia pelaksana Organizing Committee yang merupakan kolaborasi antara CIFOR, Departemen Kehutanan dan LATIN. Mereka adalah: Dina Juliarti Hubudin, Elizabeth Linda Yuliani, Erna Rosdiana, Happy Tarumadevyanto, Iva Febrina, Noviar, Nurjanah Kambaruddin, Purnomo Djatmiko, Rahayu Koesnadi, Rosita Go, Sheilla, Sri Hartati dan Yani Saloh.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Lokakarya Nasional Sosial Forestri ini yaitu: DfID-MFP, Ford Foundation, FKKM, Departemen Kehutanan, CIFOR dan ADB, juga kepada seluruh lembaga yang telah berkolaborasi yaitu: LATIN, CAPABLE, KpSHK, ICRAF dan IPB.

Walaupun lokakarya nasional ini telah selesai, kerja kolaborasi harus terus dilanjutkan. Lokakarya Nasional Sosial Forestri bulan September 2002 ini hanyalah merupakan langkah awal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi bersama sosial forestri.

Bogor, April 2003
CIFOR dan LATIN

PEMBUKAAN

Kecenderungan Sosial Forestri di Dunia¹

David Kaimowitz, Direktur Jenderal CIFOR

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian,

Di seluruh dunia, terjadi kecenderungan untuk mendorong semakin besarnya akses masyarakat lokal atas sumberdaya hutan. Selama lima belas tahun terakhir, pemerintah di Amerika Latin, telah melakukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Mereka telah memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengelola 1.000.000 hektar kawasan hutan. Di Mexico, hampir 75% masyarakat telah memperoleh hak atas sumberdaya hutan. Demikian pula yang terjadi di Afrika. Hampir seluruh negara Afrika Timur dan Selatan telah meningkatkan pengakuannya terhadap hak masyarakat lokal atas sumberdaya hutan.

Sekarang, di Asia, *community forestry* telah berkembang dengan pesat di India, Nepal, dan Philipina, juga China. Negara-negara tersebut telah mengalokasikan lahan yang terdegradasi kepada para petani kecil.

Pertemuan internasional terakhir di Afrika Selatan, yaitu *World Summit of Sustainable Development* yang dihadiri oleh 130,000 orang dari seluruh dunia, juga mengakui bahwa gerakan *community forestry* akan menjadi sintesa dari gerakan kehutanan dunia. Deklarasi akhir mengakui *community forestry* untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk mempercepat gerakan *community forestry* di seluruh dunia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah adanya pengakuan dari seluruh negara-negara dunia bahwa mereka telah gagal mengelola hutannya untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal. Kedua, memanfaatkan iklim demokrasi yang terjadi di banyak negara berkembang. Hal ini memungkinkan terbukanya peluang bagi masyarakat lokal untuk berbicara dan menuntut haknya.

Lokakarya ini bertujuan untuk membagi pengalaman dan mendiskusikan bagaimana cara untuk mewujudkan *community forestry* di Indonesia. CIFOR dan lembaga lain yang melaksanakan lokakarya merasa sangat senang karena bisa berpartisipasi dalam proses ini.

Terima kasih

¹ Diterjemahkan dari pidato Pembukaan Lokakarya Nasional Sosial Forestri, 10 - 12 September 2002

REKOMENDASI LOKAKARYA NASIONAL

Untuk Departemen Kehutanan Republik Indonesia

Disampaikan Berdasarkan Hasil Lokakarya Nasional
"Refleksi Empat Tahun Reformasi: Mengembangkan Sosial Forestri dalam Era Desentralisasi"

1. Pendahuluan

Lokakarya Nasional Sosial Forestri diikuti 174 peserta dari berbagai lembaga dan para pihak (termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat) dipandang sangat strategis bagi pengembangan sosial forestri di Indonesia. Lokakarya ini merupakan tanggapan dan sekaligus memberikan dukungan kepada Menteri Kehutanan yang menetapkan sosial forestri sebagai 'payung' dari lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan (pemberantasan penebangan liar; penanggulangan kebakaran hutan; restrukturisasi sektor kehutanan; rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan; penguatan desentralisasi kehutanan). Berbagai pihak yang mendukung sosial forestri mengharapkan bahwa sosial forestri tidak hanya merupakan 'payung', tetapi juga dijadikan jiwa pengelolaan hutan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Dengan keragaman peserta (praktisi, akademisi/peneliti, LSM, dan birokrasi) dan pengalaman lapangan, lokakarya ini telah berhasil mengangkat berbagai pelajaran berharga tentang bentuk atau konsep sosial forestri di Indonesia, ragam permasalahan yang dihadapi, cara yang ditempuh dalam penerapan sosial forestri dan faktor penghambat. Salah satu dari pelajaran tersebut adalah perlunya membangun kebijakan nasional yang didasarkan fakta serta kebutuhan lapangan. Peserta lokakarya telah bersepakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan konsep dan perbedaan definisi sosial forestri, sebaliknya siap untuk bekerjasama agar mampu berpacu dengan degradasi hutan di Indonesia.

2. Refleksi Sosial Forestri

- 2.1 Peserta lokakarya umumnya menyadari dan menyoroti bahwa pengelolaan hutan yang berbasis kepada sektor perindustrian skala besar tidak berhasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan. Oleh sebab itu dirasakan perlu untuk memperbaharui bentuk dan sistem pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

- 2.2 Sosial forestri bukan suatu hal baru di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa ada keragaman inisiatif dan pendekatan yang sudah dikembangkan dengan hasil yang bervariasi. Inisiatif-inisiatif ini tidak harus diseragamkan tetapi perlu didukung dengan kemauan politik dan kebijakan yang memadai. Pengalaman empiris dari lapangan dan berbagai bidang kegiatan pendukung sosial forestri selanjutnya diangkat dan dipelajari untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi pembaharuan kebijakan sosial forestri.
- 2.3 Sosial forestri dianggap sebagai pintu masuk untuk pendemokratisasian pengelolaan sumberdaya hutan. Semua pihak sepakat bahwa sosial forestri akan menjadi salah satu pilihan (*option*) pengelolaan hutan ke depan. Walaupun ada perbedaan pendapat dan inisiatif namun terlihat beberapa prinsip, strategi dan pendekatan sangatlah umum dalam penerapan sosial forestri di Indonesia.
- 2.4 Prinsip dan persyaratan sosial forestri bisa dirangkum dari berbagai pengalaman dan bisa saling memperkuat satu sama lain, yaitu dengan mengangkat elemen-elemen yang positif dan konstruktif untuk implementasi sosial forestri di lapangan.
- 2.5 Sosial forestri masih belum mampu memenuhi harapan banyak pihak dan perlu dibenahi. Penyebab kurang berhasilnya sosial forestri di masa lalu antara lain adalah kebijakan yang tidak mendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait, sosial forestri dianggap sebagai proyek, serta tidak dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perumusan program.

3. Rekomendasi untuk Pengembangan Sosial Forestri

3.1 *Desentralisasi dan kepastian ruang kelola sosial forestri*

- 3.1.1 Departemen Kehutanan diharapkan melakukan koordinasi dengan daerah dalam menetapkan ruang kelola sosial forestri dengan mengakomodasi inisiatif daerah dan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar sosial forestri terintegrasi dengan program pembangunan wilayah.
- 3.1.2 Kepastian akses dan hak (dengan berbagai tingkatannya seperti pemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, pemakai dan lain-lain) terhadap tanah dan sumberdaya alam oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya merupakan suatu prasyarat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Oleh sebab itu Departemen Kehutanan seyogyanya melakukan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait. Selanjutnya dianggap perlu adanya pengakuan (*recognition*) oleh berbagai pihak termasuk Departemen Kehutanan terhadap inisiatif-inisiatif sosial forestri yang sudah berjalan selama ini.
- 3.1.3 Wacana tentang rasionalisasi kawasan hutan berkembang selama lokakarya, untuk itu berbagai pihak termasuk Departemen Kehutanan diharapkan dapat memahami wacana ini dengan bijaksana dan mengembangkan mekanisme dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada TAP MPR No. IX Tahun 2001 Departemen Kehutanan diharapkan bekerja sama dengan BPN dalam menyusun mekanisme dan proses pelepasan kawasan dan pengukuhan hak masyarakat.

3.2 Penguatan institusi lokal dan proses belajar bersama

- 3.2.1 Masalah mendasar dalam institusi lokal dan pembelajaran bersama adalah lemahnya modal sosial (*social capital*), oleh sebab itu Departemen Kehutanan diharapkan dapat mendukung pengembangan institusi lokal sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- 3.2.2 Membangun kelembagaan sosial forestri di tingkat internal melalui simpul belajar untuk mengubah '*mindset*' aparat kehutanan (pusat dan daerah) dari paradigma konvensional (a.l. orientasi *timber management*, proses *top-down*) ke arah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, berdasarkan pengalaman lapangan.
- 3.2.3 Membentuk dan memperkuat jaringan pembelajaran dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang sosial forestri, terutama kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan lembaga penelitian serta masyarakat lokal.
- 3.2.4 Pengambilan keputusan dalam pengembangan sosial forestri seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif dan bertanggung gugat (*accountable*). Untuk itu perlu dikembangkan sistem informasi dan dokumentasi, serta dibutuhkan komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan sosial forestri.

3.3 Koordinasi dan keselarasan kerja inisiator

- 3.3.1 Departemen Kehutanan diharapkan lebih berperan aktif baik sebagai inisiator maupun sebagai peserta dalam pengembangan simpul belajar. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan pengembangan komunikasi dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang sosial forestri.
- 3.3.2 Departemen Kehutanan perlu membangun sistem koordinasi dan keselarasan kerja antar inisiator dengan berprinsip pada aspek kesetaraan.
- 3.3.3 Untuk mendorong sosial forestri ke depan, pemerintah pusat termasuk Departemen Kehutanan perlu mengembangkan mekanisme untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan, pertemuan multipihak, share dana dan menyebarkan informasi tentang sosial forestri.

3.4 Kebijakan nasional

- 3.4.1 Departemen Kehutanan diharapkan dapat mempercepat proses reformasi kebijakan sosial forestri melalui peninjauan kembali (*review*) peraturan perundangan yang tidak sinkron dengan prinsip-prinsip sosial forestri. Peraturan yang dibuat seharusnya lebih bersifat membuka peluang daripada sekedar mengatur serta mengekang perkembangannya, sehingga dapat mendukung program sosial forestri dan kehutanan nasional.

- 3.4.2 Dalam penyusunan kebijakan sosial forestri perlu dikembangkan mekanisme konsultasi, komunikasi dan informasi dimana peran berbagai pihak dihargai dan diakomodir. Kebijakan ini harus mudah untuk implementasikan dan dipantau.

Jakarta, 11 November 2002
Panitia Pengarah
Panitia Lokakarya Nasional

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Refleksi reformasi bidang kehutanan untuk mengembangkan sosial forestri penting dilakukan dan paling sedikit ada tiga alasan yang menyebabkannya. Pertama, pendekatan pengelolaan hutan berbasis negara (*state-based forest management*) yang telah diterapkan selama ini telah gagal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, serta gagal dalam melestarikan sumberdaya hutan itu sendiri. Kedua, sejak desentralisasi digulirkan, banyak pemerintah daerah yang berinisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan (*community-based forest management*). Bentuknya bermacam-macam, misalnya Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PHOM) di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang berlaku untuk kawasan hutan seluas 100 ha, di kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dsb. Ketiga, pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan keragaman istilah, pengertian dan penerapannya, telah dikembangkan oleh banyak lembaga, baik Departemen Kehutanan, perusahaan, organisasi non pemerintah (ornop) maupun komunitas lokal, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Banyak istilah atau terminologi muncul, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), *Community Forestry*, Sosial Forestri, HPH Bina Desa, repong damar, tembawang, simpunk, dsb.

Di sisi lain, hingga saat ini, pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tetap berada di posisi pinggir, dan bukan menjadi pilihan pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan. Pengelolaan hutan oleh perusahaan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tampaknya masih menjadi pilihan utama. Karenanya menjadi menarik, ketika Menteri Kehutanan, Dr. Mohamad Prakosa, pada bulan Juli 2002, menyatakan bahwa "Sekarang saatnya menjadikan sosial forestri sebagai payung dari lima program utama Departemen Kehutanan." Pernyataan Menteri Kehutanan tersebut bisa dianggap sebagai peluang bagi pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun pernyataan itu bisa jadi belum memadai untuk mendukung perkembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, apabila tidak disertai dengan dukungan dari seluruh aparat Departemen Kehutanan baik yang ada di pusat maupun di daerah. tampaknya selalu ada keraguan pada aparat Departemen Kehutanan terhadap pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. "Apakah masyarakat mampu mengelola hutan? Apakah

hutan dapat lestari apabila pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat?” adalah dua contoh keraguan yang selalu dipertanyakan oleh aparat pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan.

Lokakarya yang bertema “Refleksi Empat Tahun Reformasi: Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi” ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk mengurangi keraguan di atas dan sebaliknya akan menambah keyakinan aparat pemerintah terhadap pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kontribusi tidak hanya diharapkan dari berbagai teori yang dibangun berdasarkan pendekatan ilmiah (*scientific*) melainkan juga berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Oleh karena itu lokakarya ini selain mengundang para pakar dari mancanegara dan berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia sebagai pembicara, juga mengundang para praktisi untuk terlibat membagi pengalaman dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, beberapa lembaga yang telah melakukan berbagai pendekatan dalam konteks sosial forestri, berinisiatif untuk menyelenggarakan lokakarya bertema “Refleksi Empat Tahun Reformasi: Mengembangkan Sosial Forestri di Era Desentralisasi”. Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 10 - 12 September 2002 di Cimacan, Bogor. Sebanyak 174 peserta menghadiri acara ini. Mereka berasal baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (LSM), para petani, pengusaha, perguruan tinggi, dsb. (Lampiran 3)

Tujuan

Lokakarya ini diharapkan menghasilkan masukan bagi pengembangan strategi dan kebijakan nasional untuk mendukung sosial forestri dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam masa desentralisasi.

Untuk mencapai tujuan itu, lokakarya ini akan membuat peluang untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka:

1. Merefleksi bersama mengenai perkembangan paradigma dan pengalaman sosial forestri di Indonesia, terutama dalam empat tahun yang terakhir pada masa desentralisasi.
2. Menganalisa kebutuhan yang ada sekarang.
3. Mengidentifikasi prioritas masalah, pendekatan untuk mengatasi masalah dan hasil yang diharapkan sebagai masukan untuk strategi nasional sosial forestri.

Prosiding yang berisi hasil lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya bagi pihak Departemen Kehutanan. Hasil yang tercantum di dalam prosiding kiranya bisa menambah keyakinan para pengambil keputusan di lingkungan Departemen Kehutanan bahwa inisiatif sosial forestri harus menjadi pilihan sistem yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan Indonesia, walaupun disadari banyak kendala yang dihadapi.

Isi Prosiding

Isi prosiding dibuat ringkas agar lebih mudah dibaca. Pada bagian pertama, pembaca akan disuguhkan dengan sikap optimisme yang berkembang di dunia bahwa sosial forestry akan berkembang dengan pesat. Sikap optimisme itulah yang juga patut dibawa ke tingkat nasional. Pembaca dapat membaca sikap ini di bagian kedua, mengenai rekomendasi hasil lokakarya nasional. Bagian rekomendasi ini merupakan intisari dari hasil lokakarya nasional, yang bisa dibaca secara cepat tanpa perlu membaca keseluruhan isi prosiding.

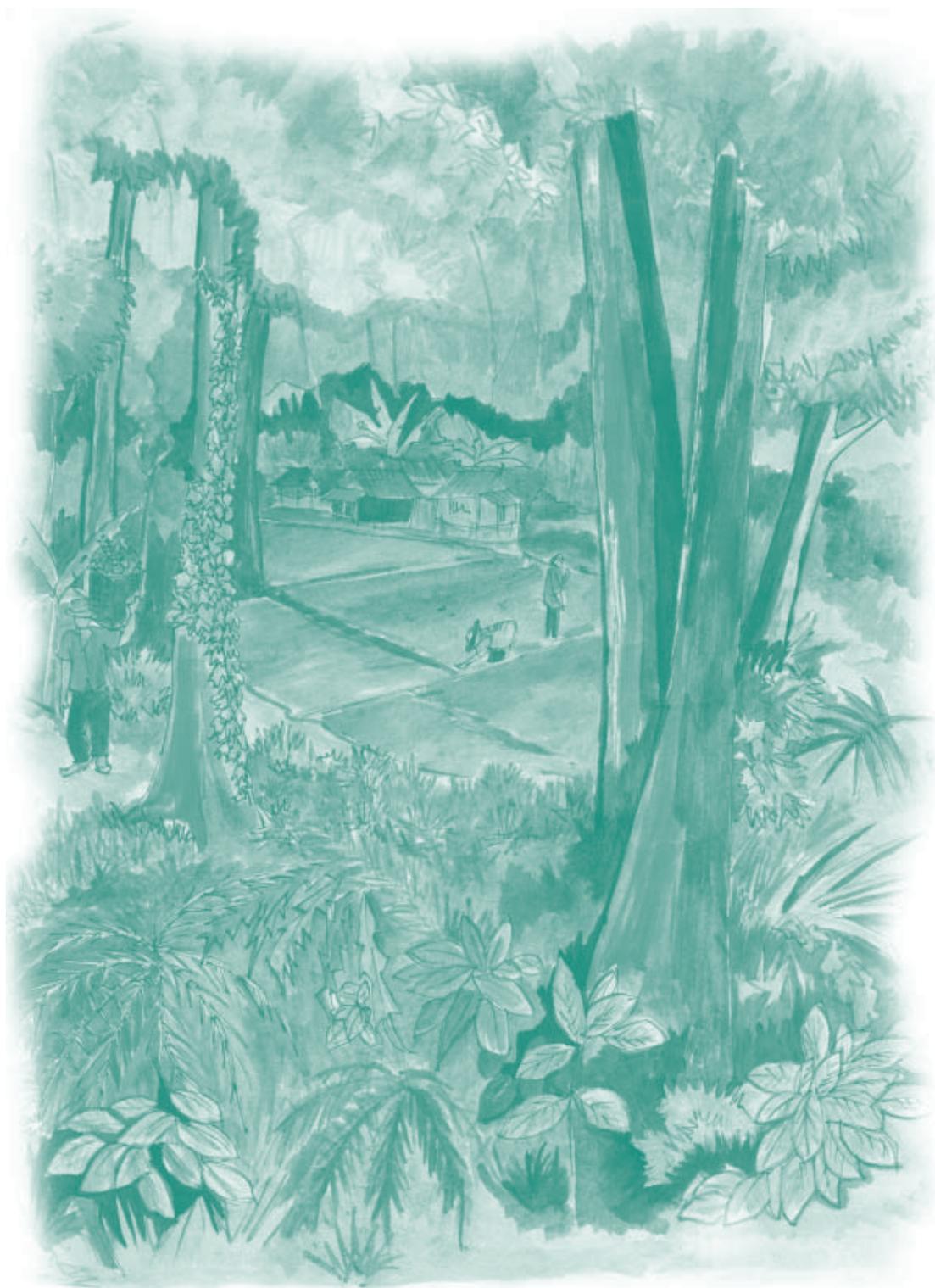
Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengapa Lokakarya Nasional Sosial Forestri ini diadakan, tujuan lokakarya, siapa yang hadir, dan apa yang dibahas, dapat membaca bagian pendahuluan.

Setelah pendahuluan, bagian berikutnya berisi hasil diskusi sosial forestry, berupa sejarah sosial forestry di Indonesia, prinsip-prinsip sosial forestry, dan ragam inisiatif sosial forestry di Indonesia. Sejarah sosial forestry sengaja diletakkan di awal bagian, karena bagian ini memberi pengantar tentang perkembangan sosial forestry sejak awal. Pembaca akan menemukan kesamaan permasalahan yang dihadapi dalam dunia kehutanan, yakni ketidakjelasan batas wilayah hutan yang diakibatkan dari penetapan kawasan hutan yang terlalu terburu-buru, tanpa memeriksa kondisi di lapangan. Demikian juga isu hak atas lahan hutan, telah ada sejak lama, dan masih dijumpai sampai sekarang. Latar belakang sejarah yang dikemukakan merupakan pengantar untuk lebih memahami prinsip-prinsip sosial forestry. Setelah itu, pembaca dapat menemukan beragam inisiatif sosial forestry yang sudah dikembangkan oleh berbagai pihak di Indonesia.

Bagian selanjutnya berisi masalah-masalah yang dihadapi oleh sosial forestry di Indonesia. Dari sekian banyak permasalahan yang diungkap oleh peserta, maka panitia pengarah telah mengelompokkan masalah tersebut menjadi empat kelompok besar, yakni (a) masalah yang berhubungan dengan kebijakan nasional kehutanan, (b) masalah desentralisasi dan kepastian ruang kelola rakyat, (c) masalah institusi lokal dan proses pembelajaran bersama, dan (d) masalah hubungan di antara para inisiator.

Masalah-masalah yang telah disebut merupakan masalah mendasar yang harus dipecahkan melalui strategi-strategi tertentu. Bagian selanjutnya berisi strategi untuk mengembangkan sosial forestry di Indonesia. Dalam bagian ini dapat dijumpai prasyarat yang diperlukan untuk mengembangkan sosial forestry, strategi pengembangannya, dan peran para stakeholder untuk mewujudkan bekerjanya strategi yang ditentukan.

Bagian terakhir adalah kesimpulan dari seluruh hasil diskusi sosial forestry.



SEJARAH SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA

Nancy Peluso, University of California, Berkeley



Sejarah pada esensinya merupakan suatu pengamatan transformasi. Dan saya kira di masa yang akan datang kita akan memandang transformasi-transformasi yang terjadi sekarang ini sebagai saat yang sangat penting dalam sejarah kehutanan, sejarah agraria dan sejarah masyarakat di Indonesia.

Dalam kondisi transisi secara luas pada saat ini, perlu dipikirkan kembali arti kata kunci. Karena kata kunci tersebut sudah mengalami perubahan dalam praktek, maka kita juga harus berubah mengikuti perubahan tersebut. Kita juga harus tahu bagaimana hal-hal tertentu diungkapkan oleh masing-masing kata.

Kata Kunci Pertama: Hutan

Kata kunci pertama yang akan digali lebih dalam adalah "hutan". Pertanyaan sederhananya adalah sebagai berikut, hutan itu apa? Secara biologis hutan berarti sebagai sebuah ekosistem? Atau ada arti politis, jadi suatu kawasan politik pemerintah yang dibawah yuridiksi sebuah instansi yang dikatakan Kehutanan atau Perhutani? Statusnya hutan tapi kondisi di lapangan adalah milik negara. Kita semua tahu di kawasan belum tentu ada tumbuh-tumbuhan yang dapat disebut hutan secara biologis.

"History of Forest and Politic in Indonesia can't be separated from the history of colonial and post colonial." Di Jawa, kehutanan cukup kuat pada zaman kolonial dan hutan di Jawa termasuk hutan politik yang pertama di Asia Tenggara sebelum Inggris di Malaysia, Vietnam, Philipina dan negara Asia Tenggara lainnya. Mulai pertengahan abad XIX hutan sudah mulai diukur, dipetakan, dibagi-bagi, dibuat pal, didaftarkan dan diatur dengan peraturan-peraturan khusus.

Tetapi di Kalimantan, dengan definisi hutan politik seperti yang disebutkan di atas belum ada pada zaman kolonial. Selama zaman kolonial, petugas kehutanan yang ada hanya 17 orang untuk seluruh kawasan Borneo bagian Belanda. Padahal pada saat yang sama, petugas kehutanan di Jawa berjumlah 5.000 orang lebih dan hampir semuanya ditempatkan di kawasan hutan jati. Apa yang sekarang disebut hutan di Kalimantan, pada zaman kolonial dianggap yuridiksi dalam pemerintahan sipil.

Kita semua tahu bahwa hutan politik di Kalimantan baru efektif pada tahun 1967 yang sesungguhnya dikembangkan berdasarkan pengalaman pada tahun 1950-an sebelum diterbitkannya UU Kehutanan No.5 Tahun 1967. Hutan itu banyak dibuat, digambar di Bogor, belum di lapangan. Maka terjadinya situasi dimana yang disebut hutan sebetulnya tidak keseluruhannya merupakan hutan dalam pengertian biologis.

Sebagian wilayah hutan bisa jadi tanah orang, tanaman kebun, rumah, yuridiksi orang, dsb. Tapi tetap saja disebut sebagai wilayah hutan. Menurut data statistik bahwa 72% dari lahan di Indonesia adalah hutan. Apakah statistik itu benar atau tidak - mungkin perlu diragukan.

Nah, meskipun demikian, mungkin kita tidak mau terlalu ekstrim, karena mungkin ada juga wilayah hutan yang belum di klaim orang secara individu atau secara kolektif. Dan hal-hal seperti ini yang perlu digali untuk membuat rencana baru pengelolaan dan penguasaan lahan dan hutan (rasionalisasi kawasan hutan).

Karena sejarah hutan tidak berhenti pada tahun 1967, maka banyak kejadian dan peristiwa sejak itu yang perlu dipertimbangkan di masing-masing daerah.

Kata Kunci Kedua: Masyarakat

Kata kunci yang kedua yang saya ingin gali adalah "masyarakat". Sebagai sosiolog saya sudah sering mendengar kata masyarakat terutama di sesi-sesi kemarin tetapi artinya itu belum jelas. Mengapa? Karena seperti hutan, masyarakat pun punya berbagai arti dan juga ada sejarahnya. Dan kalau kita tidak mau menggali sejarahnya, penggunaan kata masyarakat bisa berbahaya. Apa "masyarakat" berbeda dengan "rakyat" ? Apa masyarakat sipil berbeda dengan konsep yang diakui LSM atau NGO? Itu hanya sedikit contoh pertanyaan yang perlu kita gali. Istilah "masyarakat" mungkin mengandung atau terdiri dari banyak sekali grup dan individu yang punya berbagai identitas dan cara mengklaim akses ke sumberdaya alam termasuk hutan, lahan untuk bertani atau rumah, air dan lainnya.

Dalam diskusi yang berkembang sejauh ini saya mendapat kesan bahwa masyarakat yang dibicarakan disini hanya masyarakat adat saja. Dan saya tahu bahwa masyarakat adat itu sudah menjadi semacam gerakan di Indonesia dimana orang-orang dari berbagai tempat bekerja sama untuk tujuan-tujuan sosial dan politiknya dan itu normal dan wajar-wajar saja.

Tetapi kalau yang dimaksud disini masyarakat adat saja, saya kira tidak cukup luas konsepnya. Dan akhirnya transformasi politik dan kebijakan kehutanan akan terlalu sempit. Misalnya saja yang dikemukakan Pak Sombolinggi kemarin mengenai TNI dan masyarakat di hutan, disamping Kahar Muzakkar di hutan. Sebetulnya beliau memberikan contoh yang sangat penting tentang proses pembentukan hutan tidak hanya di Sulawesi, tetapi di Indonesia, dan di Asia Tenggara umumnya dan diberbagai negara Afrika dan Amerika Latin. Perang sangat mempengaruhi bentuk hutan dan membentuk komunitas masyarakat yang punya klaim di hutan. Dan masyarakat itu belum tentu berasal dari hutan.

Beberapa contohnya saja di Indonesia. Yang paling besar mungkin penjajahan Jepang. Banyak orang lari atau diusir ke hutan, tinggal dan bekerja untuk pemerintah Jepang. Ada perang di Jawa dengan Belanda tahun 1825 yang memaksa migrasi orang dari tempat asalnya ke tempat baru di hutan atau sekitarnya. Juga banyak terjadi perang

antar suku sebelum dan selama pemerintahan kolonial yang mengakibatkan migrasi dan pemindahan. Sejarah migrasi dan klaim orang-orang terhadap tempat-tempat asalnya (wilayah adapt) seringkali dihapuskan.

Sekarang kalau dilihat sejarah masyarakat yang ada di dalam atau di sekitar hutan, ternyata terdapat beragam peristiwa sejarah yang mereka lalui. Dengan demikian mereka punya sejarah tertentu dan pengalaman pahit karena dipindahkan atau dipaksa migrasi/pindah. Mereka merasa berhak juga di wilayah hutan. Dan selama seminar ini, masyarakat tersebut belum dibicarakan. Misalnya para transmigran, atau korban perang yang pindah ke hutan (DI/TII), Kahar Muzakkar, orang-orang di Aceh, di Papua Barat. Atau pun orang-orang migrasi spontan, yang menikah di tempat baru atau diberi hak untuk menggarap lahan di sana oleh masyarakat setempat. Bagaimana mereka akan terlibat dalam sistem sosial forestri? Itu perlu dibicarakan secara terbuka.

Satu hal lagi mengenai definisi masyarakat yang perlu dipertimbangkan adalah mereka merupakan orang yang ada di dalam anda. Semua orang yang ada di dalam komunitas itu tidak selalu sama. Tidak semua akan setuju dengan keputusan-keputusan orang yang berkuasa di tempat tersebut. Hampir dipastikan bahwa akan selalu ada perbedaan struktural dalam masyarakat desa maupun masyarakat kabupaten, misalnya dalam hal ekonominya, kekuasaannya, umurnya, dan gendernya. Oleh sebab itu sosial forestri seharusnya tidak dimonopoli oleh kelas-kelas ekonomi kuat, golongan-golongan mayoritas dan minoritas yang berkuasa ataupun dimonopoli kaum laki-laki setempat saja.

Kata Kunci Ketiga: Kehutanan

Kata kunci ketiga adalah istilah kehutanan. Masih perlu dipertanyakan masa depan istilah dan konsep kehutanan, serta lembaga kehutanan sebagai instansi pemerintah.

Mulai abad XIX istilah kehutanan di Indonesia punya arti, wujud dan maksud tertentu. Tetapi seperti disebut kemarin lembaga kehutanan sendiri juga sudah mengalami perubahan bentuk, tujuan dan orientasi. Kenyataannya banyak klaim agraria dan sengketa tanah di wilayah hutan. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan kembali bentuk dan fungsi kehutanan sebagai suatu lembaga pemerintah. Bentuknya apa nanti mungkin perlu didiskusikan?

Kembali lagi ke sejarah dan sedikit ke pengalaman negara-negara lainnya. Bentuk lembaga kehutanan di Indonesia sudah banyak sekali ragamnya. Contohnya salah satu sebab mengapa instansi kehutanan di Kalimantan ataupun di Sarawak, di Siam Muangthai dan di beberapa tempat lain tidak begitu berkuasa, karena ada perdebatan diantara beberapa instansi pemerintah mengenai yuridiksi mereka semua. Jadi seminar-seminarnya tidak hanya antara masyarakat dengan kehutanan, atau LSM dengan kehutanan, atau donor dengan kehutanan. Tapi juga menyangkut kehutanan, agraria, pertanian, perkebunan, perikanan dan pemerintah sipil. Selanjutnya secara bersama-sama mereka membagi tugas dan yuridiksi.

Dan kalau wilayah yang sekarang disebut "hutan" akan dibagi atau akan diubah menjadi tanah rakyat, hutan rakyat atau sebagian akan diakui sebagai tanah milik perorangan atau secara kolektif, maka belum tentu bentuk kehutanan sebagai instansi atau lembaga pemerintah harus sama dengan sekarang.

Hal ini sudah dapat banyak perhatian di luar negeri - *Royal Forest Department* di Muangthai dulu hanya kerja mengawasi *logging*, tetapi oleh karena perubahan dalam sumber kayu, lembaga ini terpaksa berubah menjadi badan konservasi. Kemarin juga disebut-sebut kehutanan Philipina merubah bentuknya karena terpaksa. Contoh lain di Amerika Serikat, misalnya di bidang pendidikan kehutanan. *Yale University*, sekolah kehutanan yang pertama didirikan di Amerika Serikat baru mengganti namanya menjadi Sekolah Lingkungan Hidup. Tidak lagi disebut Sekolah Kehutanan. Di *UC Berkeley*, program kehutanan mengalami banyak perubahan dan kebetulan saya juga ikut mengerjakan kurikulum baru yang juga bersejarah itu.

Jadi beberapa pertanyaan yang perlu dipikirkan selama lokakarya ini adalah apa itu kehutanan di abad XXI? Apa perlunya dan bagaimana konsep kehutanan sosial? Atau apakah kita masih membutuhkan kehutanan? Itulah beberapa pikiran-pikiran dan masukan saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kalau saya menyinggung perasaan orang. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pengembangan sosial forestri di Indonesia.

SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA



Prinsip-prinsip Sosial Forestri²

Prinsip sosial forestri adalah suatu hal yang harus ada dan tidak dapat diabaikan. Tanpa prinsip, maka sosial forestri menjadi tidak dapat dibedakan dengan pendekatan pengelolaan hutan yang lainnya. Tanpa adanya prinsip, sosial forestri tidak dapat dibedakan dengan pengelolaan hutan yang bertumpu pada kepentingan pemerintah. Berdasarkan diskusi yang berkembang selama lokakarya, dapat disimpulkan enam prinsip sosial forestri.

Prinsip Pertama: Sosial forestri adalah sistem pengelolaan hutan

Sosial forestri adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan hutan tidak lagi mementingkan aspek kayu semata (*timber management*), melainkan juga mempertimbangkan hasil hutan non kayu. Bahkan di banyak lokasi, hasil hutan non kayu merupakan produk utama sosial forestri. Di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan ada kelompok sosial forestri yang mengembangkan vanili. Pada akhir musim tanam petani dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 500 juta dari hasil vanilinya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hutan non kayu juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, bahkan melebihi kayu, tanpa merusak ekosistem hutan itu sendiri.

Sebagai sebuah sistem, satuan wilayah kelolanya bisa jadi bukan merupakan batas administratif tapi satuan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Contohnya di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang menjadi sumber dari 5 DAS. Pendekatan DAS merupakan pendekatan strategi utama yang dijadikan model yang saat ini sedang dipersiapkan untuk komuniti forestri (yang juga dijalankan oleh Departemen Kehutanan).

Satu hal lain yang penting adalah bahwa sosial forestri tidak boleh dilaksanakan dengan pendekatan proyek. Biasanya pendekatan proyek dibatasi oleh waktu pelaksanaan

² Disarikan dari hasil diskusi selama Lokakarya Nasional Sosial Forestri

yang sangat terbatas, yakni satu tahun anggaran, yang belum tentu dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Dana yang digunakan juga tidak bisa fleksibel, karena sudah ditentukan alokasi dan harus digunakan sesuai alokasinya. Ruang untuk mengubah alokasi anggaran sangat terbatas, padahal perubahan yang terjadi di lapang dalam periode satu tahun anggaran bisa banyak sekali.

Prinsip Kedua: Sosial forestri ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

Implikasi dari penerapan prinsip ini sangat luas, karena menyangkut pada terjaminnya akses dan manfaat jangka panjang sumberdaya hutan untuk masyarakat adat dan lokal. Untuk itu sosial forestri mengharuskan adanya kepastian hak-hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya lahan dan hutan, karena masyarakat adalah pelaku utama pengelolaan hutan. Mereka adalah pihak yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan hutan. Mereka juga merupakan pihak yang akan memperoleh dampak langsung akibat pengelolaan hutan.

Kepastian hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya hutan berimplikasi pada kepastian hukum ruang kelola sosial forestri. Ini berarti memerlukan rasionalisasi dan realokasi sumberdaya hutan yang dikelola masyarakat. Saat ini ICRAF telah mencoba menghitung ulang alokasi ruang kelola bagi masyarakat adat dan lokal.

Banyak kelompok masyarakat yang telah menunjukkan bahwa kearifan lokal yang dimiliki telah dikembangkan untuk mengelola sumberdaya hutan secara lestari (lihat Lampiran tentang daftar inisiatif sosial forestri). Oleh karena itu, pemerintah juga harus menghormati, mengakui, dan mendorong berkembangnya kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Dalam tataran praktek, pengelolaan sumberdaya hutan juga harus optimal dan dapat membuka peluang-peluang ekonomi yang lebih baik dan adil bagi masyarakat adat dan lokal. Dan yang lebih penting adalah kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak menjebak masyarakat menjadi semakin bergantung pada sumberdaya dari luar, tapi sebaliknya dapat mendorong masyarakat untuk mandiri dengan tetap memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan.

Untuk menjamin berlangsungnya proses-proses produksi dalam pengelolaan hutan, maka sosial forestri juga diharapkan mampu menjadi alat untuk menghindarkan terjadinya konflik antar pihak, baik konflik horizontal maupun vertikal. Kalaupun ada konflik, maka sosial forestri dapat menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil.

Prinsip Ketiga: Sosial forestri harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya sumberdaya hutan

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di dalam sosial forestri harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Sekarang ini, laju deforestasi jauh lebih besar daripada laju rehabilitasi. Karenanya, upaya untuk mempercepat laju rehabilitasi menjadi tantangan besar bagi sosial forestri. Di samping itu, upaya perlindungan dan pengamanan hutan juga menjadi tantangan sosial forestri, untuk mengurangi laju degradasi hutan.

Di sisi lain, sosial forestri juga bisa diterapkan di kawasan-kawasan konservasi, seperti taman nasional, tentunya dengan menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi konservasi. Beberapa contoh penerapan sosial forestri di kawasan taman nasional dapat dilihat pada lampiran tentang daftar inisiatif sosial forestri.

Prinsip Keempat: Menghormati dan mengakui keragaman inisiatif

Sosial forestri dapat didefinisikan macam-macam. Tidak ada satu definisi pun yang dapat mengakomodir semua inisiatif sosial forestri yang berkembang sekarang. Peserta lokakarya sepakat untuk tidak memperdebatkan perbedaan definisi, melainkan berupaya untuk menghormati dan mengakui keragaman inisiatif yang ada.

Yang lebih penting adalah upaya untuk mendokumentasikan dan menyebarkan berbagai inisiatif yang ada, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para inisiator di tempat lain.

Sebagai bagian dari pengakuan keragaman inisiatif sosial forestri, maka sudah selayaknya apabila sosial forestri diadopsi menjadi kurikulum dalam pendidikan kehutanan Indonesia.

Prinsip Kelima: Mendorong proses kolaborasi multipihak

Sosial forestri harus mendorong proses-proses kolaborasi multipihak. Dalam proses kolaborasi harus ada kejelasan hak, peran, tanggung jawab, manfaat, dan hubungan di antara para pihak. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka diharapkan proses belajar di antara para inisiator dan pihak lain yang terlibat, dapat menjadi lebih lancar. Kelancaran ini juga menuntut prasyarat rasa saling percaya.

Dengan adanya prinsip kolaborasi, maka sosial forestri juga menciptakan ruang-ruang partisipasi publik bagi para pihak yang berkepentingan terhadap hutan.

Contoh bisa dilihat di kabupaten Kutai Barat, yang menyusun program kehutanan secara kolaboratif multipihak, dimana pengelolaan hutan dilakukan dengan berbagi peran di antara para pihak yang terlibat, sehingga tidak ada perebutan kekuasaan. Dalam pengelolaan hutan kolaboratif ini masing-masing pihak memiliki peran yang spesifik yang tidak dipunyai oleh pihak yang lain sehingga menghasilkan sebuah sinergi, yang tidak perlu tarik-menarik kekuasaan antara pusat dengan daerah, antara daerah yang satu dengan lainnya karena ini semua adalah dalam konteks kebersamaan.

Prinsip Keenam: Adanya dukungan kebijakan pemerintah

Sosial forestri harus didukung oleh kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah. Dukungan kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap pengembangan sosial forestri. Namun, perlu dipikirkan cara terbaik untuk mengubah sistem pengelolaan hutan. Sekarang mungkin saat yang tepat untuk transisi dari sistem pengelolaan hutan yang mementingkan pengusaha hutan (HPH) kepada sosial forestri, yang lebih mementingkan masyarakat adat atau lokal.

Dukungan pemerintah juga diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Landasan hukum bagi sosial forestri harus ada, karena kebijakan sosial forestri sangat rentan terhadap perubahan kepemimpinan struktural di Departemen Kehutanan.

Ragam Inisiatif Sosial Forestri³

Memahami sosial forestri tidak bisa lagi hanya dilihat dari satu sisi saja. Kalau kita melihat dan memahami hasil pemaparan pengalaman para inisiator sosial forestri, baik yang bekerja di lapang bersama masyarakat maupun yang bekerja di tingkat nasional untuk advokasi kebijakan, maka mau tidak mau harus diakui bahwa kita kaya dengan pengalaman.

Ragam inisiatif sosial forestri yang telah dikembangkan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yakni (a) contoh kasus, (b) alat bantu pengembangan sosial forestri, dan (c) program atau kebijakan.

Dari daftar inisiatif yang telah didiskusikan dalam Lokakarya Nasional Sosial forestri, dapat dijumpai 39 contoh kasus sosial forestri di berbagai daerah (Tabel 1). Contoh kasus bisa dikatakan sebagai bentuk-bentuk implementasi sosial forestri di lapang, yang mempunyai karakteristik berbeda satu sama lain. Berbagai contoh kasus tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yakni di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTT, NTB, dan Papua. Sayangnya tidak ada contoh dari Bali dan Maluku.

Kalau dipetakan, bentuk-bentuk implementasi sosial forestri bisa bermacam-macam. Secara garis besar, paling sedikit ada enam bentuk implementasi, yaitu:

- Pendampingan langsung bersama masyarakat.
- Pembentukan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
- Perwujudan HAM, reforma agraria, peran perempuan yg terkait langsung dengan interaksi masyarakat dan hutan.
- Perwujudan peran positif lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam sosial forestri.
- Proses pembelajaran bersama para pihak.
- Sharing hasil usaha dengan masyarakat.

Selain itu, kalau mau dilihat bentuk-bentuk interaksi masyarakat dengan hutan, kita bisa menemukan empat kategori interaksi, yakni:

- Kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemegang hak kelola hutan sesuai dengan peraturan pemerintah.
- Inisiatif masyarakat yang mendapat pendampingan dari pihak lain.
- Keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.
- Masyarakat memperoleh ijin dari pemerintah.

Selain contoh kasus, sebagian peserta Lokakarya Nasional Sosial Forestri juga menyumbangkan pengalamannya dalam mengembangkan alat bantu sosial forestri. Tidak kurang 23 inisiatif telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan alat bantu ini (Tabel 1). Secara garis besar, alat bantu yang dikembangkan adalah konsep atau gagasan, berbagai bentuk forum komunikasi dan dialog, berbagai cara fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, penelitian, pengembangan media komunikasi dan informasi, serta pengembangan analisis kebijakan dan resolusi konflik.

³ Disarikan dari hasil diskusi selama Lokakarya Nasional Sosial Forestri

Ada pula inisiatif berupa pengembangan program atau kebijakan yang bersifat umum. Ada 17 program atau kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan donor (Lampiran 2). Biasanya program atau kebijakan yang diterapkan mempunyai skala geografi yang luas. Untuk program atau kebijakan pemerintah daerah, biasanya satu kabupaten atau satu propinsi. Pemerintah pusat biasanya mengeluarkan kebijakan atau program yang bersifat nasional, atau paling tidak mencakup beberapa propinsi sekaligus. Lain lagi dengan perusahaan, yang biasanya mengembangkan program untuk satu wilayah yang dikelola, yang bisa mencakup beberapa atau propinsi. Sedangkan program donor bisa berskala nasional, yang mencakup seluruh Indonesia.

Berbagai sudut pandang dan keragaman inisiatif di atas sesungguhnya menunjukkan potret sosial forestri yang berwarna-warni. Dengan menerima dan memahami keragaman tersebut, kita berharap sosial forestri tidak lagi dipandang dari sudut sempit. Sosial forestri jangan lagi diartikan hanya HKm, atau hanya PHBM semata. Bukan berarti HKm atau PHBM salah, tapi jangan sampai terjadi bahwa kita hanya menganut satu pola sosial forestri.

Tabel 1. Contoh-contoh inisiatif sosial forestri di berbagai daerah

No. Inisiatif	Deskripsi singkat
Sumatera	
1. Pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Batu Kerbau, Jambi Kontak: Rahmat Hidayat (WARSI)	Proses yang sudah dilakukan oleh WARSI antara lain pendampingan masyarakat yang meliputi penggalian aturan adat, pengambilan data dasar (inventarisasi partisipatif, RRA, PRA), membangun rencana kampung, membangun indikator partisipatif, mendorong proses kesepakatan pengelolaan, pemetaan partisipatif. Selain itu dilakukan pula proses mengkomunikasikan piagam kesepakatan berikut petanya kepada Bupati, DPRD, Bappeda, Dinas Kehutanan, BPN, Lembaga Adat, Camat, dan desa tetangga, melalui temu kampung, workshop kabupaten, dan hearing. Proses komunikasi kepada publik juga dilakukan melalui ekspose media massa, membagi catatan proses, studi banding, temu rakyat, dan memfasilitasi kunjungan para pihak. Pada tahun 2000, Bupati telah mengukuhkan hutan adat Desa Batu Kerbau melalui SK Bupati No. 1249/2000.
2. Sosial forestri di PT Musi Hutan Persada, Kontak: PT MHP	PT Musi Hutan Persada telah mengembangkan HTI Trans (Hutan Tanaman Industri bersama Transmigran), seluas ± 300.000 ha, dimulai tahun 1991 sampai sekarang, dengan menanam jenis Akasia, dengan melibatkan 500 KK. Setiap KK mendapat lahan seluas 0,25 ha untuk tempat tinggal dan pekarangan, 1 ha lahan untuk kebun karet, dan biaya hidup 1 tahun. Transmigran berkewajiban untuk membantu kegiatan HTI dan menjaga kelestariannya. Proses yang dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pembentukan kelompok - Penetapan lokasi - Pembuatan akta - Kesepakatan - Pelaksanaan - Penunjukan pihak ketiga - Program penunjang - Pembinaan dan pelatihan
3. Hutan rakyat di Desa Batu Kerbau, kecamatan Pelepat, kabupaten Bungo, Jambi Kontak: Tafrizal dan WARSI	Sejak tahun 1986/1997, masyarakat telah merancang hutan adat, hutan lindung, lubang alam dan salak alam, yang sekarang telah memperoleh pengukuhan dari Bupati.

4.	CBFM (Community-based Forest Management) di Desa Pelepat Bungo, Jambi Kontak: Eddy H.S. (Gita Buana)	Proses yang dilakukan: fasilitasi dialog antara masyarakat dengan stakeholder, memfasilitasi Baru studi banding.
5.	Pengelolaan buffer zone (Bangka, Sumsel) Kontak: Dwi Sudarto Wakil SAM II DEPHUT	Program rehabilitasi di Pulau Bangka, kerjasama antara masyarakat, BRLKT, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Daerah. Dalam program itu, masyarakat diperbolehkan mengelola lahan seluas 0,6 ha untuk ditanami karet dengan cara tumpang sari. Dan masyarakat diminta untuk menjaga tanaman hasil rehabilitasi. Pihak pemerintah menyumbang tanaman semusim dan saprodi.
6.	HKM di Gunung Betung Lampung Kontak: Suyatno	HKM di Gunung Betung telah memperoleh ijin sementara dari Menteri Kehutanan pada tahun 1999. Masyarakat di Gunung Betung telah mengembangkan proses pembelajaran bersama melalui kerjasama dalam kelompok dan membangun aturan bersama. Secara fisik, tujuh kelompok secara swadaya telah menanam 533.778 batang pohon serba guna.
7.	PHR di Nagari Mahat Sumatera Barat Kontak: Alfian Miko	Masyarakat di Nagari Mahat, yang tidak berinteraksi dengan hutan secara langsung, telah membangun regulasi kelompok yang antara lain mengatur status lahan ulayat, suku dan pribadi.
8.	Hutan energi multifungsi di Sumatera Barat Kontak: HTN Energi Sumbar	Hutan energi telah dibangun di 4 desa, dengan luas 20 ha. Masalah yang dihadapi antara lain belum ada kesepakatan tenurial.
9.	CBFM di Jambi Kontak: M. Ridwansyah	Program CBFM di Kabupaten Batang Hari dan Tanjung Jabung Jambi ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan bekas HPH dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja. Proses yang telah dilakukan adalah sosialisasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi.

Jawa dan Madura

1.	Implementasi Perhutanan Sosial di hutan payau di Jawa Barat Kontak: Rustam (APIK)	Masyarakat dan PT Perhutani mengembangkan kerjasama <i>sylvofishery</i> (pengelolaan hutan payau digabung dengan perikanan), di tingkat BKPH.
2.	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Pajambon, Kabupaten Kuningan Jawa Barat Kontak: Rustam (Visita)	Masyarakat dan PT Perhutani telah mengembangkan kerjasama pengelolaan kawasan wisata di desa Pajambon, sejak setahun lalu. Pak Rustam (Visita) memfasilitasi forum PHBM tingkat desa, dan juga menjadi salah satu aktor utama yang mendukung pembentukan forum PHBM di tingkat kabupaten.
3.	Pengelolaan hutan desa di Boyolali Kontak: Berdy Steven (Gita Pertiwi, Solo)	Masyarakat mengembangkan pengelolaan hutan desa dengan model pengelolaan hutan pangkuan desa/ <i>plong-plongan</i> . Proses yang dilakukan adalah penguatan institusi masyarakat, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan membangun kesepakatan dengan PT

		Perhutani dan aparat pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Di desa juga terbentuk forum desa (MSH).
4.	Restorasi Hutan Pendidikan Gunung Walat Kontak: Didik Suhardjito dan Nurheni (Fakultas Kehutanan IPB)	Hutan pendidikan Gunung Walat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, telah dikelola oleh Fakultas Kehutanan IPB untuk kepentingan praktek pengelolaan hutan bagi mahasiswa IPB. Sejak dua tahun terakhir, telah dilakukan pendekatan pengelolaan hutan kolaboratif antara masyarakat dengan Fakultas Kehutanan IPB. Kegiatan yang bersifat peningkatan pendapatan telah dilakukan di sana. Proses yang dilakukan meliputi identifikasi masalah dengan metode PRA, melakukan pertemuan para pihak yang berkepentingan terhadap Gunung Walat, serta memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pengelola hutan pendidikan Gunung Walat dengan masyarakat. Hasilnya, telah ada perjanjian kesepakatan dengan 24 kelompok tani (250 orang) yang mengelola lahan seluas 80 ha.
5.	HKM di Ciamis Kontak: P2SE	Pilot project pengembangan HKM di Ciamis dilakukan atas kerjasama antara P2SE, Litbang Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Proses yang dilakukan masih merupakan proses awal.
6.	Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri Secara Kolaboratif Kontak : Nurhadi (KAIL)	TN Meru Betiri, Jember, telah dikelola secara kolaboratif antara pihak taman nasional dengan masyarakat. Aktivitas kolaborasi yang signifikan berlangsung sejak tahun 1999. Dan sampai sekarang, tidak kurang dari 3000 KK yang bermukim di 5 desa, telah terlibat dalam mengelola lahan seluas 2000 ha, di dalam zona rehabilitasi TN Meru Betiri.
7.	PHJO (Pengelolaan Hutan Jati Optimal) di Madiun Kontak: Markum Awali (Fakultas Kehutanan UGM)	Proses yang telah dilakukan adalah mengembangkan <i>bilateral matching institution</i> , menyusun perencanaan, PKD, penjarangan, penelitian dan pengembangan, dan menerbitkan publikasi.
8.	Rehabilitasi oleh masyarakat di Desa Cijulang Sukabumi Kontak: Sigit (Koordinator Sekretariat JK3GS: Jaringan Kerja Konservasi Kawasan Gunung Salak) atau BCI Bogor	JK3GS telah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan program hutan kemasyarakatan di Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Program ini merupakan kerjasama antara Tim Pemberdayaan Masyarakat Jampang Tengah dengan PT Perhutani (KPH Sukabumi) untuk menanam jati lokal dan jenis tumbuhan lokal lainnya di lahan seluas 40 ha. Program ini didampingi oleh LSM: JK3GS, LSM Grass, dan TWH.
9.	PHBM di Sukabumi Kontak: Warno (LATIN)	PHBM yang dikembangkan baru melingkupi satu desa, dimana sebanyak lebih kurang 1000 KK terlibat dalam pengelolaan hutan negara (Perhutani) seluas 1000 ha. Namun, baru sekitar 50 ha yang sudah ada perjanjian kerjasamanya, antara masyarakat dengan Perhutani.
10.	Hutan desa di Kulon Progo Yogyakarta Kontak: Yayasan Damar	Masyarakat desa dan pemerintah desa telah berinisiatif untuk mengelola hutan desa. Hutan desa adalah hutan negara yang secara administratif masuk wilayah desa,

yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

- | | |
|-------------------------|--|
| 11. HKM di Gunung Kidul | Lokasi yang dikembangkan meliputi areal seluas 4.185 ha, dan telah dikembangkan sejak tahun 1996 namun berhenti pada tahun 1999. Pada tahun 2001, atas inisiatif LSM dan perguruan tinggi, program HKM dilanjutkan. Program ini merupakan kerjasama antara masyarakat dengan Pemda. Tahun 2002, Menteri Kehutanan telah meminta Bupati Gunung Kidul untuk mengeluarkan ijin pengelolaan, walaupun pencadangannya belum disahkan. Sekarang sedang terjadi proses negosiasi pembagian keuntungan antara masyarakat dengan Pemda. Usulan masyarakat 60 : 40, sedangkan Pemda 50 : 50. |
|-------------------------|--|

Kalimantan

- | | |
|---|---|
| 1. Hutan rakyat di Kabupaten Malinau
Kontak: CIFOR | Pendampingan diskusi masyarakat Dayak tentang pengelolaan sumber daya hutan melalui kerjasama antar desa dan dialog dengan pemerintah daerah dan mengembangkan tata ruang secara partisipatif. |
| 2. SFDP (Social Forestry Development Project) di Sanggau Kalimantan Barat
Kontak: Larst | Deskripsi singkat lihat: www.socialforestry.org |
| 3. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas ladang di Desa Rantau Buta dan Rantau Layung, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur | Masyarakat telah menyusun rencana pemanfaatan lahan bekas ladang, yang di dalamnya termasuk berbagai pelatihan mengenai cara bertanam dengan metode stek dan okulasi. Proposal pemanfaatan lahan telah diajukan ke Dinas Kehutanan dan disetujui pada bulan Mei 2002. Sekarang kelompok tani mulai menyiapkan pembibitan. |
| 4. Pengelolaan hutan berbasis kampung (Benung, Kaltim)
Kontak: Nopilus (Plasma) | Masyarakat Benung telah melakukan proses perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan. Di dalam proses tersebut disebutkan bahwa masyarakat berperan penuh dalam mengambil keputusan. |
| 5. Pengelolaan Hutan Partisipatif (HKM, Sanggau KalBar)
Kontak: Anang Sudarnang | Hutan yang dikelola secara partisipatif mempunyai luas 102.500 ha. Proses yang dilakukan dimulai dengan identifikasi kebutuhan dengan metode PRA, lalu didiskusikan tata guna lahan desa dan penyusunan rencana aksi. Selain itu dilakukan pula penguatan kelembagaan. Kegiatan yang menonjol adalah community logging seluas 16.500 ha dan reboisasi partisipatif. |
| 6. Pengelolaan Kawasan TN Danau Sentarum Berbasis Masyarakat
Kontak: Ade Jumhur (Riak Bumi) | Proses yang sudah dilakukan adalah melakukan inventarisasi kebutuhan masyarakat dan mendiskusikan rencana tindak lanjut. Hasil nyata yang telah dicapai antara lain pemasaran produk hasil hutan non kayu yaitu madu dan rotan, penerbitan buletin, adanya proses pembelajaran bersama melalui pertemuan, dan kegiatan |

		rehabilitasi lahan kebakaran dengan tanaman pakan lebah yang berasal dari bibit lokal.
7.	Perlindungan hutan rimba sebagai sumber air bersih di Desa Setulang Kontak: Ramses Iwan	Masyarakat di Desa Setulang telah berdiskusi untuk melindungi hutan sebagai sumber air bersih. Sekarang telah ada peraturan desa tentang hal itu. Sayangnya, belum ada pengakuan terhadap hak masyarakat atas hutan dan belum jelas batas dengan desa tetangga.
8.	Advokasi Kawasan Meratus; Paser; dan Lahan Gambut Kontak: Koesnadi W.S. (Regional Support Program Borneo/Musyafir)	Tujuan kegiatan adalah mendorong pengelolaan sumberdaya hutan berbasis kawasan dan komunitas, yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain penjajakan kebutuhan kelembagaan, pertemuan tingkat kampung, antar kampung, dan antar kawasan DAS kabupaten, pertemuan dan lokakarya perencanaan bersama, serta implementasi hasil berdasarkan peran masing-masing lembaga.
9.	HKM Kontak: Firdaus (SHK Kaltim)	SHK Kaltim telah memfasilitasi masyarakat untuk mendiskusikan keuntungan dan kerugian program HKM. Program HKM yang dikembangkan, berasal dari hasil diskusi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga program HKM merupakan program yang langsung diturunkan oleh masyarakat, dan juga didukung oleh pemda setempat.
10.	Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PHOM) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Kontak: Paulus Hadi	PHOM dikembangkan untuk menjawab masalah tumpang tindih lahan, <i>community logging</i> yang tidak ekonomis dan tidak lestari, ketidakjelasan hak atas pengelolaan sumberdaya alam, dan terpinggirkannya ekonomi kerakyatan. Dalam PHOM ada enam langkah yang dikembangkan, yaitu: (a) pengembangan sumberdaya alam, (b) pengembangan sumberdaya manusia, (c) pengembangan sistem teknis, (d) pengembangan kelembagaan, (e) pengembangan ekonomi dan pemasaran, (f) pengembangan sistem intervensi.
11.	Mewujudkan CBFM di tingkat operasional, pengalaman PT Inhutani II Kontak: Tjipta Purwita (Inhutani II)	Proses yang dilakukan meliputi: a. mendorong pelaksana operasional menerapkan program pemberdaya masyarakat, menerapkan pola PHBM/SF maupun pola-pola lain yang bersifat <i>local spesific</i> . b. menghimpun bahan-bahan/pengalaman berbagai pihak sebagai <i>benchmark</i> . c. mendorong masyarakat untuk bekerjasama atas dasar pola kerjasama yang saling menguntungkan (<i>reciprocal relationship</i>). d. selalu melakukan monitoring dan evaluasi terus menerus (<i>continous improvement</i>). e. membuat panduan umum untuk membekali para manajer untuk lebih mengenal program-program pemberdayaan masyarakat.
12.	Kebun rotan di Kutai Barat	Masyarakat di Kutai Barat telah membudidayakan rotan sejak lama, dan sekarang sudah berhasil membentuk perkumpulan petani dan pengrajin rotan.

Namun, sayangnya lahan yang dikelola masyarakat tersebut belum diakui oleh pemerintah.

- | | |
|---|--|
| 13. Hutan rakyat di Kalimantan Selatan
Kontak: Dailami | Beberapa pola pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah dilakukan, yakni pengembangan hutan rakyat, HKM, pembentukan mitra sepaham kehutanan, dan tumpang sari HTI. |
| 14. Hutan rakyat Dayak | Masyarakat Dayak telah mengembangkan klasifikasi hutan yang dikelola, yakni kurat (1 - 5 tahun), batakung (6 - 20 tahun), bengkar bengkalatn (21 - 50 tahun). Bagi masyarakat Dayak, hutan berfungsi sebagai tempat berburu, sumber bahan bangunan dan bahan upacara adat kebudayaan adat Dayak, tempat mencari obat-obatan, tempat tinggal binatang langka, dan tempat tinggal para dewa. |

Sulawesi

- | | |
|--|--|
| 1. Hutan adat Katu, Sulawesi Tengah
Kontak: Ferdinand Lumeno dan Arianto Sangaji (Yayasan Tanah Merdeka) | Masyarakat adat Katu telah mendapat pengakuan dari Balai Taman Nasional (BTN) Lore Lindu untuk tetap tinggal di wilayah adatnya. Masyarakat adat telah mengelola hutan rotan dan damar dengan sistem rotasi. Masyarakat juga membangun kesepakatan aturan dan sanksi tentang wilayah adat Katu. Masyarakat Katu telah memiliki siklus pengelolaan sumberdaya hutan yang terdiri atas pandulu, hinoe, holu, lopo lehe, lopo N'tua dan kembali lagi ke hinoe dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah kawasan adat Katu dijadikan sebagai kawasan taman nasional sejak tahun 1982, yakni TN Lore Lindu. Masyarakat Katu dengan didampingi LSM melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari pengelola TN Lore Lindu. Kegiatan yang dilakukan adalah studi tenurial, pemetaan partisipatif, inventarisasi pengelolaan sumberdaya alam secara partisipatif, membangun dialog dengan pemerintah, negosiasi dengan pengelola TN Lore Lindu, dan aksi-aksi massa. Akhirnya masyarakat Katu memperoleh pengakuan dari pengelola TN Lore Lindu. Namun, sekarang ada 64 desa yang menghadapi persoalan sama, yang belum terjawab. |
| 2. SHK di Kabupaten Donggala Sulawesi Tenggara
Kontak: Dedeng Alwi (Evergreen) | Proses penguatan kapasitas masyarakat; fasilitasi dialog para pihak; advokasi kebijakan. |
| 3. Implementasi Pengelolaan Hutan Multipihak di desa Bualemo, Gorontalo
Kontak: Anwar Dua (Kepala desa Bualemo) Yeti (KKIP) R.M. Alam Rivai Hen Restu | Masyarakat di desa Bualemo telah mengembangkan sistem pengelolaan hutan multipihak, yang dimulai dengan pembuatan peta kawasan hutan secara partisipatif, yang kelak akan dikelola. Saat ini peta tersebut sedang diajukan kepada Pemerintah kabupaten Gorontalo agar memperoleh pengakuan. |

-
- | | | |
|----|---|---|
| 4. | Pengelolaan hutan oleh masyarakat berkelanjutan di Tana Toraja Sulawesi Selatan
Kontak: L. Sombolinggi (WALDA) | Proses yang dilakukan meliputi inventarisasi kondisi hutan, identifikasi permasalahan, perumusan sasaran/tujuan, dan perencanaan hutan secara partisipatif. |
|----|---|---|

Bali dan Nusa Tenggara

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Pengelolaan Kawasan Sesaot
Kontak: Witardi, Konsepsi | Kegiatan yang dilakukan adalah membangun infrastruktur penegasan wilayah kelola, dan penguatan ekonomi selain kayu. |
|----|---|---|

Papua

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Ecoforestry di Papua
Kontak: Lyndon Pangkali | <i>Ecoforestry</i> atau sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat merupakan inisiatif baru yang dikembangkan di Papua. Inisiatif <i>ecoforestry</i> sendiri belum menjadi agenda masyarakat adat. Namun, beberapa aktivitas yang telah berhasil dilakukan adalah melakukan pemetaan partisipatif di Cagar Alam Pegunungan <i>Cycloop</i> dan melakukan studi banding ke Papua New Guinea. |
|----|---|---|
-

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA³



Pada dasarnya, sosial forestri berkembang di Indonesia untuk menjawab masalah ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, yang bersumber dari cara pandang pemerintah terhadap sumberdaya hutan. Cara pandang atau paradigma pengelolaan sumberdaya hutan yang digunakan oleh pemerintah adalah paradigma yang bertumpu pada kepentingan pemerintah semata, dan meminggirkan kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi karena posisi pemerintah terhadap rakyat yang masih dominan. Cara pandang demikian telah membuat sumberdaya hutan menjadi obyek eksploitasi. Sumberdaya hutan dipandang sebagai sumber devisa. Cara pandang demikian juga menyebabkan terjadinya dikotomi antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Juga dikotomi antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat lokal.

Akibat penggunaan paradigma seperti itu, maka terjadilah penurunan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan, menjadi miskin karena mereka tidak memperoleh akses dan jaminan memperoleh manfaat jangka panjang dari sumberdaya hutan yang ada di sekeliling mereka. Jangankan pendapatan yang meningkat, lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga semakin kecil. Di lain sisi, pengusaha hutan adalah pihak yang paling diuntungkan. Dan biasanya pengusaha banyak mendatangkan pekerja dari luar desa. Akibatnya sering muncul konflik, baik di antara masyarakat setempat dengan pengusaha, maupun antara masyarakat setempat dengan pendatang.

Akibat lain dari paradigma pengelolaan hutan yang bertumpu pada kepentingan pemerintah adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, khususnya sumberdaya hutan. Konflik yang terjadi menyebabkan sumberdaya hutan menjadi sumberdaya yang bisa diakses oleh siapa saja, tanpa perlu bertanggung jawab untuk merehabilitasinya. Apalagi permintaan kayu tetap meningkat. Perambahan dan pembalakan ilegal semakin marak. Kerusakan hutan bertambah parah.

Apabila ditelusuri lebih jauh, masalah yang ditimbulkan dari penggunaan paradigma pengelolaan hutan yang bertumpu pada kepentingan pemerintah tersebut, berimplikasi

³ Disarikan dari hasil diskusi selama Lokakarya Nasional Sosial Forestri

pada munculnya (a) masalah kebijakan nasional, (b) masalah desentralisasi dan kepastian ruang kelola sosial forestri, (c) masalah institusi lokal dan terhambatnya proses pembelajaran bersama, serta (d) masalah koordinasi dan keselarasan kerja antar inisiator. Keempat masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat pengembangan sosial forestri di masa depan.

Masalah Mendasar dari Kebijakan Nasional

Masalah mendasar pertama dari kebijakan nasional adalah ketidakberpihakan kebijakan pada masyarakat setempat, atau kalau boleh dikatakan kebijakan pemerintah telah meminggirkan masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- Dinegasikannya hukum adat,
- Ketidakjelasan tata ruang bagi masyarakat setempat,
- Terhambatnya inisiatif lokal oleh adanya kebijakan dari pusat sehingga menimbulkan konflik baru di lapangan,
- Penegakan hukum yang tidak tegas dan pilih kasih,
- Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mementingkan peningkatan pendapatan daerah dan lebih suka mengundang investor besar ketimbang mengembangkan usaha-usaha produktif masyarakat setempat,
- Masih kuatnya kewenangan pusat dalam pengelolaan hutan seperti yang dijumpai di pulau Jawa dimana Perum Perhutani menjadi pengelola tunggal sumberdaya hutan,
- Apabila terjadi upaya pengelolaan hutan secara kolaboratif antara pengusaha dengan masyarakat setempat, seringkali pembagian hasil atau keuntungan masih belum adil bagi masyarakat.

Ketidakberpihakan kebijakan pada masyarakat setempat antara lain disebabkan belum berubahnya sikap dan pola pikir para birokrat kehutanan, yang masih berorientasi pada profit atau keuntungan semata. Dengan demikian pendekatan Sosial Forestri bisa jadi merupakan ancaman bagi mereka, karena dapat mengganggu bisnis birokrat.

Kalau dilihat dari proses penyusunan kebijakan, maka masalah mendasar yang diidentifikasi adalah tidak adanya mekanisme konsultasi publik, komunikasi, dan pengumpulan dan penyebaran informasi yang mengakomodir peran para pihak, khususnya masyarakat setempat, serta tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses monitoring terhadap implementasi kebijakan. Setelah kebijakan diimplementasikan, juga tidak ada proses pertanggungjawaban publik.

Masalah mendasar lain adalah tidak sinkronnya peraturan perundangan di tingkat nasional yang bisa tercermin dari tumpang tindih antar sektor seperti kasus konversi lahan menjadi peruntukan lain, akibat dari tekanan perusahaan perkebunan besar dan munculnya perkebunan sawit sejuta hektar. Hal ini disebabkan oleh masih besarnya egosektoral. Bahkan di dalam lingkungan Departemen Kehutanan sendiri, masih belum terlihat adanya kebijakan lintas direktorat, khususnya koordinasi dalam hal substansi kebijakan.

Masalah di atas semakin diperparah dengan lemahnya peraturan dan penegakan hukum atas peraturan yang sudah ada. Seringkali peraturan yang dibuat tidak didasarkan pada informasi kondisi lapang yang sebenarnya, dan proses penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan menjadi tidak

operasional. Bahkan di era otonomi ini, kebijakan dari pusat seringkali menjadi tidak berwujud di daerah. Belum lagi penegakan hukum yang tidak konsisten dan pilih kasih. Situasi seperti itu, yang disebut dengan *lawless* menyebabkan sulitnya pengembangan sosial forestry di masa depan.

Masalah lain dari kebijakan nasional terletak pada persoalan manajemen yang meliputi keterbatasan sumberdaya baik dana maupun kapasitas sumberdaya manusia. Diakui oleh Departemen Kehutanan sendiri, bahwa situasi kehutanan yang mengalami krisis seperti sekarang, tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah.

Masalah dalam Desentralisasi dan Kepastian Ruang Kelola Masyarakat

Era otonomi atau desentralisasi merupakan suatu hal baru yang belum sempurna pelaksanaannya, dan masih mempunyai masalah. Dalam konteks kejelasan ruang kelola masyarakat, desentralisasi pengelolaan hutan seharusnya mampu menjawab permasalahan kepastian akses dan hak (dengan berbagai tingkatannya seperti pemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, pemakai, dan lain-lain) terhadap tanah dan sumberdaya alam oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya.

Sayangnya, dalam penetapan ruang kelola masyarakat masih dijumpai kelemahan koordinasi antar daerah, maupun antara daerah dengan pemerintah pusat, serta masih tidak jelasnya peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar sosial forestry terintegrasi dengan program pembangunan wilayah.

Penetapan ruang kelola masyarakat juga menyangkut persoalan rasionalisasi kawasan hutan. Wacana tentang rasionalisasi kawasan hutan berkembang selama lokakarya, untuk itu berbagai pihak termasuk Departemen Kehutanan diharapkan dapat memahami wacana ini dengan bijaksana dan mengembangkan mekanisme dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Masalah Institusi Lokal dan Proses Pembelajaran Bersama

Masalah mendasar dalam institusi lokal dan pembelajaran bersama adalah lemahnya modal sosial, oleh sebab itu Departemen Kehutanan diharapkan dapat mendukung pengembangan institusi lokal sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Lemahnya modal sosial antara lain berupa ketidakjelasan pengakuan batas antar desa yang menimbulkan serta konflik klaim hak antar kelompok adat atau desa.

Lemahnya modal sosial juga bisa dilihat dari masih lemahnya kelembagaan lokal dan kemampuan masyarakat lokal untuk membagi pengalaman dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir atau 'mindset' aparat kehutanan (pusat dan daerah) dari paradigma konvensional (*a.l. orientasi timber management, proses top-down*) ke arah pengelolaan hutan berbasis masyarakat, berdasarkan pengalaman lapangan.

Lemahnya modal sosial juga tercermin dari lemahnya jaringan pembelajaran dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang sosial forestry, terutama kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta masyarakat lokal.

Dalam proses pembelajaran, terdapat kelemahan dalam hal pertukaran informasi dan data. Hal ini mengakibatkan proses pengambilan keputusan dalam pengembangan sosial forestri menjadi kurang transparan, kurang partisipatif dan kurang bertanggung gugat (*accountable*).

Masalah Koordinasi dan Keselarasan Kerja Inisiator

Koordinasi dan keselarasan kerja inisiator adalah masalah yang mudah diidentifikasi namun sulit untuk dipecahkan, selama masih terjadi kebuntuan komunikasi antar pihak karena masih belum ada rasa saling percaya atau masih saling curiga dan saling tuduh. Masalah ketidakpercayaan adalah masalah paling mendasar. Ketidakpercayaan ini menjalar menjadi masalah kurangnya komitmen bersama dari berbagai pihak.

Koordinasi dan keselarasan ditandai pula dengan kurang berkembangnya simpul-simpul belajar yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, termasuk kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan multipihak, dan belum adanya mekanisme kemitraan yang jelas.

STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL FORESTRI DI INDONESIA⁴



Sosial forestri akan mampu berkembang di Indonesia apabila memenuhi prasyarat serta mempunyai kejelasan strategi. Prasyarat untuk pengembangan sosial forestri adalah ada upaya untuk memperjelas wilayah kelola masyarakat, adanya upaya untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan dan institusi pemerintah, adanya upaya untuk membangun kelembagaan masyarakat yang kuat, adanya upaya untuk mengembangkan cara-cara atau praktek-praktek pengelolaan hutan di tingkat lapangan, serta adanya upaya untuk mengembangkan aset sosial dan manusia.

Prasyarat di atas harus dilanjutkan dengan pengembangan strategi yang tepat, yaitu:

1. Strategi untuk mengembangkan kebijakan nasional yang mendukung sosial forestri.
2. Strategi desentralisasi dan kepastian ruang kelola masyarakat.
3. Strategi untuk mengembangkan keselarasan kerja antar inisiator.
4. Strategi untuk memperkuat institusi lokal dan proses pembelajaran bersama.

Prasyarat yang Harus Disiapkan

Adanya upaya untuk memperjelas wilayah kelola masyarakat

Kejelasan wilayah kelola masyarakat merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya sosial forestri di Indonesia. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk memperjelas hal tersebut. Beberapa upaya yang telah dibahas adalah adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengalokasikan kawasan hutan menjadi wilayah kelola masyarakat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karenanya wacana rasionalisasi kawasan hutan menjadi relevan untuk dibicarakan dan dikembangkan menjadi kebijakan yang implementatif dan dapat dioperasionalisasikan. Kejelasan wilayah kelola masyarakat ini juga harus didukung oleh perangkat peraturan seperti Peraturan Daerah.

⁴ Disarikan dari hasil diskusi selama Lokakarya Nasional Sosial Forestri

Adanya upaya untuk melakukan perubahan kebijakan dan institusi pemerintah

Upaya-upaya perubahan yang harus dilakukan antara lain:

- Mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, transparansi, dan partisipatif, baik dalam proses penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan maupun pada saat pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan.
- Mengembangkan mekanisme kelembagaan kolaboratif yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak, misalnya pembentukan dewan masyarakat pengelola taman nasional.
- Memperbaiki organisasi dan mekanisme prosedur di tingkat internal pengelola dan pembuat kebijakan.
- Mendorong kemauan politik pemerintah agar mau menjalankan upaya-upaya di atas, sehingga berakibat pada pemberian prioritas tinggi untuk mengalokasikan dana kepada inisiatif sosial forestri.

Adanya upaya untuk membangun kelembagaan masyarakat yang kuat

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kelembagaan masyarakat yang kuat ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan para pihak lain, khususnya pengambil kebijakan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan pengaturan internal kelompok masyarakat pengelola sumberdaya hutan, serta memperjelas strategi untuk memperoleh akses atas proses-proses pengambilan keputusan.

Adanya upaya untuk mengembangkan praktek-praktek pengelolaan hutan di lapangan

Upaya untuk mengembangkan praktek-praktek pengelolaan hutan di lapangan harus dilakukan secara inovatif. Pengalaman pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan besar selama ini terbukti tidak mampu untuk mencegah kerusakan hutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya baru yang mampu mengubah pengelolaan hutan gaya lama, antara lain berupa:

- Pengakuan dan penghormatan atas keberadaan keberagaman pola pengelolaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat, yang sesuai dengan karakteristik lokal.
- Mengembangkan program rehabilitasi tumbuhan obat bersama masyarakat.
- Pengembangan sistem informasi kampung.
- Identifikasi dan inventarisasi potensi aset hutan secara partisipatif.
- Pemetaan partisipatif.
- Upaya resolusi konflik.
- Penyediaan layanan informasi pasar untuk produk-produk hutan dari masyarakat
- Mengembangkan upaya monitoring dan evaluasi yang partisipatif.

Adanya upaya untuk mengembangkan aset manusia dan aset sosial

Aset manusia dan sosial yang berkembang merupakan prasyarat bagi pengembangan sosial forestri. Aset manusia harus dikembangkan dalam hal kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, pengembangan keterampilan memfasilitasi dengan menggunakan metode-metode partisipatif yang berlandaskan pada prinsip

kesetaraan dan transparansi, pengembangan kemampuan berkomunikasi yang intensif dan efektif. Upaya sederhana yang bisa dilaksanakan dan membawa dampak yang seringkali signifikan antara lain melalui training dan studi banding.

Pengembangan aset sosial antara lain dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja dan forum-forum dialog multipihak.

Strategi Pengembangan Sosial Forestri di Indonesia

Strategi untuk mengembangkan kebijakan nasional

Strategi untuk mengembangkan suatu kebijakan nasional bertujuan untuk mendorong adanya kebijakan nasional yang mendukung upaya-upaya masyarakat dalam mengelola hutan, serta mendukung program sosial forestri secara umum. Strategi ini tidak hanya diperuntukkan bagi Departemen Kehutanan semata, melainkan juga kepada Departemen Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Juga aparat keamanan TNI dan Polisi harus terlibat juga.

Untuk itu perlu didorong mekanisme konsultasi publik dalam proses penyusunan, implementasi, dan pertanggungjawaban kebijakan. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan mekanisme konsultasi publik sesungguhnya bisa diadopsi dari siklus pembelajaran yang terdiri atas tahapan (a) pengumpulan informasi, (b) negosiasi, (c) membangun kesepakatan, (d) mengelola kesepakatan.

Pengumpulan informasi

Informasi dikumpulkan untuk menjadi bahan negosiasi dalam proses penyusunan kesepakatan atas kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Untuk itu diperlukan informasi dan data yang akurat. Informasi dan data yang diperlukan misalnya berupa inisiatif-inisiatif Sosial Forestri yang telah dilakukan oleh masyarakat secara nyata di lapangan, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini untuk menunjukkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan.

Proses pengumpulan informasi juga harus dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua pihak. Hal ini ditujukan agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang memang berbobot setara dan tepat untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan. Selain itu yang penting dilakukan juga adalah menyebarluaskan informasi tersebut terutama kepada para pihak yang akan terkena dampak atas kebijakan yang akan dibuat. Caranya bisa melalui selebaran, media massa, internet seperti mailist dan portal, presentasi dan pameran di berbagai pertemuan, dsb.

Negosiasi

Negosiasi adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme konsultasi publik. Tanpa negosiasi, berarti upaya konsultasi publik hanyalah upaya searah yang sifatnya memberi informasi tanpa memberi kesempatan untuk memberi umpan balik dan mengkritisi rancangan kebijakan.

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk negosiasi antara lain melalui debat terbuka terhadap materi kebijakan dan forum-forum diskusi antara semua stakeholder sebelum sebuah kebijakan diberlakukan. Gerakan rakyat bersama dan advokasi kebijakan yang biasa dilakukan oleh LSM juga bisa menjadi bagian dari proses negosiasi. Namun ada juga orang yang lebih senang menyampaikan masukan atau kritiknya kepada bagian atau orang yang dianggap cukup reformis di Departemen Kehutanan atau Perhutani.

Perlu disadari juga bahwa perlu dilakukan pula pemberdayaan aparat agar mau membuka ruang-ruang komunikasi. Salah satu proses negosiasi yang sekarang sedang terjadi adalah proses judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak sesuai antara lain PP 34 Tahun 2002, amandemen UU 41 Tahun 1999. Demikian pula, banyak yang menyarankan agar kebijakan pengelolaan hutan di Jawa yang hanya diserahkan kepada Perum Perhutani ditinjau ulang.

Membuat kesepakatan

Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi dan negosiasi menjadi bahan penyusunan kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan, yang perlu dilakukan adalah:

- Membuat tata tertib penyusunan kebijakan publik yang multipihak yang dapat memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik.
- Bertemu dalam satu meja membahas kebijakan, untuk menghasilkan perumusan kebijakan yang transparan dan partisipatif.

Mengelola kesepakatan

Setelah kebijakan yang disepakati tersusun, maka selanjutnya adalah menjaga bagaimana implementasi kebijakan di lapangan dapat bekerja. Untuk itu diperlukan koordinasi antara pihak-pihak terkait, yaitu antar departemen, maupun inter departemen (pusat dengan propinsi, propinsi dengan kabupaten). Dan kalau memang diperlukan, kebijakan yang diterapkan juga harus terbuka terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya, keberadaan forum menjadi penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana forum dapat bekerja untuk mengawal kebijakan yang sudah dilahirkan atas kesepakatan bersama.

Strategi desentralisasi dan kepastian ruang kelola sosial forestri

Strategi yang dikembangkan untuk mendorong desentralisasi dan mendorong kepastian ruang kelola sosial forestri adalah:

Penguatan kapasitas

Dalam desentralisasi diperlukan penguatan kapasitas Pemda, baik eksekutif maupun legislatif khususnya untuk memberi respon terhadap beragam kepentingan para pihak; kemampuan untuk memfasilitasi forum-forum dialog yang dapat membangun pemahaman bersama; serta keterampilan untuk membangun perangkat pendukung manajemen kelembagaan multipihak, termasuk aturan dan mekanisme kerjasamanya.

Pengembangan kebijakan daerah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kebijakan daerah tentang sosial forestri. Untuk itu perlu ada upaya kaji ulang atas peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan pengembangan sosial forestri seperti PP 25 Tahun 2000, PP 34 Tahun 2002, UU 22 Tahun 1999 dan UU 41 Tahun 1999. Proses kaji ulang tersebut harus dijalankan melalui proses mekanisme konsultasi publik yang transparan.

Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan wilayah kelola masyarakat, antara lain dengan melakukan kaji ulang atas kebijakan tata ruang yang ada.

Kebijakan sosial forestri yang dikeluarkan juga memperhitungkan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya juga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan sistem informasi

Data dan informasi menjadi bagian penting dalam strategi desentralisasi dan kejelasan wilayah kelola masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan ketersediaan informasi dan data serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengembangan forum dialog

Forum dialog, baik di daerah sendiri maupun antara daerah dengan pemerintah pusat tetap dilakukan, khususnya untuk memperjelas dan menetapkan ruang kelola masyarakat. Forum juga diharapkan dapat memperjelas hak, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan sosial forestri.

Strategi untuk mengembangkan keselarasan kerja antar inisiator

Ada enam strategi untuk mengembangkan keselarasan kerja antar inisiator, yaitu:

1. Strategi peneguhan komitmen dan konsistensi
2. Strategi komunikasi dan koordinasi
3. Strategi apresiasi terhadap berbagai kepentingan
4. Strategi untuk membangun persepsi dan visi bersama
5. Strategi penegakan hukum
6. Strategi untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat

Peneguhan Komitmen dan Konsistensi

Strategi ini penting dikembangkan karena sekarang dirasakan rendahnya komitmen dari semua pihak dalam implementasi sosial forestri yang disebabkan oleh kurang adanya saling percaya antar pihak dan pelaksanaan otonomi daerah yang setengah hati.

Untuk itu perlu diteguhkan kembali komitmen dan konsistensi dengan cara:

- Melaksanakan pembagian peran antar semua pihak yang adil dan jelas dalam pelaksanaan sosial forestri.
- Merevisi kebijakan-kebijakan sosial forestri yang tidak sesuai semangat OTDA dan desentralisasi.
- Transparansi dalam kegiatan sosial forestri (*planning, action dan monitoring dan evaluation*) untuk mencapai proses pembelajaran bersama untuk membangun mutual trust diantara pihak yang terlibat.

Komunikasi dan Koordinasi

Strategi ini penting dikembangkan karena kurangnya akses informasi dokumentasi tentang sosial forestri yang diperlukan pihak-pihak untuk implementasi dan pembelajaran bersama, serta tidak adanya mekanisme dan wadah untuk komunikasi dan koordinasi multipihak dalam sosial forestri.

Untuk itu perlu dikembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi melalui pembentukan sistem informasi dan dokumentasi sosial forestri yang terintegrasi dari

semua stakeholder ataupun level/tingkat (Forum, Pokja, Website, Media cetak dan elektronik). Yang juga mendesak adalah kelanjutan komunikasi pasca lokakarya nasional sosial forestri ini.

Apresiasi Kepentingan

Strategi ini dikembangkan karena kurangnya (tidak ada) apresiasi terhadap inisiatif sosial forestri yang beragam dari para inisiator (egosektoral, egolembaga, dominansi LSM dan pemerintah, pesan donor/sponsor).

Untuk itu perlu dilakukan dialog antar inisiator-inisiator pengembang sosial forestri dalam sebuah wadah di berbagai level/tingkat untuk menumbuhkan apresiasi sosial forestri yang beragam.

Penyamaan persepsi dan visi bersama

Strategi dikembangkan karena tidak adanya kesamaan persepsi terhadap visi dan misi sosial forestri diantara para pihak yang terlibat. Untuk itu perlu dibangun visi dan misi sosial forestri yang dilanjutkan dengan penetapan agenda implementasi sosial forestri bersama. Hal lain yang juga penting adalah menyusun kode etik bermultipihak.

Penegakan hukum

Strategi dikembangkan karena adanya "mafia" hukum dalam kasus-kasus kehutanan dan lingkungan (Oknum TNI/POLRI, POLHUT atau Jaksa yang terlibat dalam pembalakan liar). Untuk itu perlu dilakukan pengawasan bersama diantara para stakeholder terhadap para pelanggar hukum bidang kehutanan misalnya memberitakan pelanggaran dan kejahatan lewat media cetak dan elektronik, pembentukan peradilan khusus kehutanan, serta pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menegakan hukum.

Meningkatkan posisi tawar masyarakat

Strategi dikembangkan karena ketidakseimbangan kekuasaan (*power*) di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial forestri misalnya masyarakat dengan pemerintah, LSM dengan donatur. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk memperkuat akses terhadap sumberdaya pihak-pihak yang terkait dengan informasi, SDM, Finansial dst.

Strategi Untuk Memperkuat Institusi Lokal dan Proses Pembelajaran Bersama

Masalah mendasar dalam institusi lokal dan proses pembelajaran bersama adalah lemahnya modal sosial, sebagai akibat dari kurangnya budaya pembelajaran bersama, lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM dalam hal kepemimpinan, komitmen, kemampuan, serta lemahnya institusi dalam hal organisasi dan aturan main.

Untuk itu perlu dikembangkan strategi untuk memperkuat institusi lokal dan proses pembelajaran bersama melalui pengembangan simpul-simpul belajar, memperkuat lembaga adat, membuka ruang gerak institusi lokal dalam pelaksanaan sosial forestri, pengembangan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi, membangun sistem dokumentasi yang sederhana, menggalang (kekuatan) jaringan, serta membangun komitmen para pihak yang terkait dalam demokratisasi pengelolaan SDA.

Peran Masing-masing Stakeholder dalam Pengembangan Sosial Forestri

Berbagai peran yang bisa dijalankan oleh setiap stakeholder telah diidentifikasi dalam Lokakarya Nasional Sosial Forestri. Secara garis besar, ada enam peranan yang dapat dijalankan, yakni (a) advokasi kebijakan, (b) peran fasilitasi, (c) pengkajian atau penelitian, (d) penyebarluasan informasi, (e) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan (f) menggalang dukungan publik.

Sedangkan stakeholder yang telah diidentifikasi juga beragam. Namun, paling tidak semua stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni (a) masyarakat, yang terdiri atas masyarakat lokal, masyarakat adat, serikat petani, (b) aparat pemerintah baik yang di pusat, daerah, maupun lapangan, (c) parlemen, yaitu DPR dan DPRD, (d) kelompok pendukung seperti LSM, berbagai forum komunikasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan dan donor.

Peran yang dijalankan oleh setiap stakeholder ditabulasikan dalam bentuk tabel, seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Secara ringkas, peranan setiap kelompok stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peran masyarakat adalah mengevaluasi kinerja pemerintah, penguatan kelembagaan masyarakat, dokumentasi pengalaman, dan memberikan informasi.
- Peran pemerintah adalah membuat kebijakan dan peraturan, menampung pendapat dari masyarakat, membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memfasilitasi forum-forum komunikasi dan dialog, memfasilitasi pengusaha agar berperan lebih aktif.
- Peran DPR dan DPRD adalah mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, serta menilai kinerja eksekutif. Mereka diharapkan juga memahami peta stakeholder, serta membangun mekanisme konsultasi publik antara lain dengan cara menampung aspirasi stakeholder.

Peran kelompok pendukung adalah mengkritisi kebijakan pemerintah, membantu penyusunan draft akademik peraturan, memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah (khususnya Departemen Kehutanan), memfasilitasi forum dialog, menjadi mediator penyelesaian konflik, pengkajian dan penelitian, penyebarluasan informasi, memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penggalangan dukungan publik.

Tabel 2. Peran stakeholder dalam pengembangan sosial forestri di Indonesia

	Masyarakat lokal	Masyarakat/ lembaga adat	Serikat petani	Pemerintah pusat	Pemerintah daerah	Dinas Kehutanan	Petugas lapang	DPR / DPRD	LSM	Forum-forum komunikasi	Perguruan Tinggi	Lembaga Penelitian	Swasta	Donor
Advokasi Kebijakan:														
Mengkritisi kebijakan nasional										X				
Mengkritisi kebijakan lokal	X	X	X					X	X					
Pengkajian dan penelitian kebijakan											X	X		
Membantu akademik draft UU Kehutanan											X			
Mengevaluasi kinerja pembuat keputusan	X	X	X					X	X	X	X	X		
Membuat peraturan daerah yang berhubungan dengan SF					X	X								
Mengakomodir aspirasi para pihak								X		X				
Menampung pendapat dan fasilitasi diskusi untuk mencari solusi				X				X		X				
Meminta saran dari tokoh dan alim ulama				X	X	X	X	X						
Fasilitasi														
Fasilitasi masyarakat dengan Dephut									X	X	X			
Penguatan kelembagaan dan pengetahuan SF masyarakat			X						X	X	X			
Fasilitasi dialog multipihak				X	X	X			X	X				
Fasilitasi pembuatan forum				X	X	X			X					
Fasilitasi kegiatan penyuluhan				X	X	X	X							
Mediator konflik							X		X	X				
Membina				X	X	X								
Penyelenggara rapat tingkat propinsi dan kabupaten			X	X	X									
Fasilitator yang netral									X	X	X			
Pelayanan				X	X	X								
Pengkajian dan Penelitian														
Dokumentasi peran dan fungsi adat dalam pengelolaan hutan		X							X		X	X		
Dokumentasi pengalaman lapangan							X		X		X	X		
Melaksanakan uji coba SF di lapangan							X		X		X	X		
Memberikan informasi	X	X							X		X	X		
Inventarisasi kepentingan SF yang beraneka ragam								X	X	X	X	X		
Penyebarluasan Informasi														
Memberikan edaran agar pengusaha berperan aktif				X	X	X								
Penyebarluasan kebenaran ilmiah SF											X	X		
Peningkatan Kapasitas SDM														
Mengembangkan kurikulum											X			
Pendidikan hukum kritis									X	X				
Pelatihan									X	X				
Mengembangkan alat bantu belajar bersama									X	X	X	X		
Menggalang Dukungan Publik														
Promosi SF									X	X				X
Menggalang dana									X	X				
Memberikan dukungan dana													X	X

KESIMPULAN



Sosial forestri sudah banyak bentuk dan ragamnya, karena sudah berkembang di Indonesia sejak lama. Sosial forestri terus akan berkembang dan mencari bentuk terbaiknya, baik dengan dukungan pemerintah atau tidak. Melihat perkembangan di tingkat nasional maupun internasional, maka kecenderungan sosial forestri akan semakin maju dengan pesat.

Di tingkat nasional, keinginan untuk saling memperkuat inisiatif sosial forestri yang beraneka ragam, dengan mengesampingkan perbedaan definisi, tentu akan membuat situasi menjadi berubah dari kompetitif menjadi kolaboratif.

Di tingkat internasional, semakin banyaknya pemerintah yang mengakui ketidak sanggupan mengelola hutan, tentu akan membuat peluang berkembangnya sosial forestri menjadi semakin besar.

Yang harus dicermati adalah apakah pemerintah sungguh-sungguh akan mengembangkan sosial forestri sebagai program payung kehutanan Indonesia. Kepentingan pengusaha pasti akan terganggu apabila sosial forestri diterapkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu perlu pula dicermati, bagaimana kepentingan pengusaha dapat terakomodir dalam sosial forestri. Dan yang terpenting dan juga berdasarkan pengalaman, program sosial forestri di masa datang membutuhkan komitmen semua pihak yang berkepentingan dan hendaknya tidak *project-oriented*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Alat (*tools*) Pengembangan Sosial Forestri

No.	Inisiatif	Deskripsi singkat
Konsep (Gagasan)		
1.	Pengelolaan hutan secara adaptif dan kolaboratif (ACM) Kontak: Yanti (CIFOR)	Konsep ACM atau kerangka pengelolaan hutan yang dibangun bersama meliputi proses refleksi perencanaan, implementasi, dan observasi yang terus-menerus. Yang diobservasi adalah proses interaksi antar kelompok. Untuk itu ACM juga mengembangkan alat bantu atau metode fasilitasi multipihak.
2.	Pengembangan Konsep dan Implementasi Pengelolaan Hutan Multipihak Kontak: Helmayeti (KKIP)	Pengelolaan hutan multipihak akan dikembangkan melalui penggalian pengetahuan lokal, pengembangan kurikulum, pengembangan perencanaan partisipatif, dan pengembangan komuniti forestri.
3.	Pengembangan Gagasan Sosial Forestri di Kutai Barat Kontak: Simon Devung (Unmul)	Pengembangan HKM di Kutai Barat – kegiatan-kegiatan ini yang dibantu CIFOR – perlu kombinasi dengan model SF lainnya seperti PHBM, atau program-program lainnya yang melibatkan semua pihak. Pengelolaan yang sudah dilakukan masyarakat seperti budidaya rotan perlu dukungan untuk dimasukkan ke dalam pengembangan SF. Wilayah bekas HPH ada kemungkinan dijadikan wilayah baru untuk <i>agroforestry</i> .
Forum Komunikasi dan Dialog		
1.	Dialog kehutanan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Jawa Barat Kontak: Hadi (SMCP-GTZ)	Dialog kehutanan dilakukan untuk mengembangkan kegiatan konservasi, rehabilitasi untuk menuju sustainable forest management. Diskusi diadakan karena ada masalah perebutan air Dawa Danau antara petani (Mitra Cai) dengan industri berat di kota Cilegon dan kabupaten Serang.
2.	Forum APIK Kontak: Rustam (APIK)	Membangun jaringan LSM pendukung implementasi sistem pengelolaan hutan kolaboratif di Jawa Barat
3.	Working Group HKM Kontak: Licken Situmorang (ICRAF)	Menurut Licken yang aktif mengikuti working group HKM di Departemen Kehutanan, biasanya perdebatan di tingkat nasional hanya berakhir dalam bentuk notulen yang disebar di mail-list. Sementara itu, kenyataan di lapang jauh berbeda dengan yang didiskusikan di tingkat nasional.
4.	Aliansi Kambuno (Sulteng) Kontak: Lakapa (BP Aliansi Kambuno)	Aliansi merupakan wadah dialog bersama tokoh adat kampung, yang kegiatannya antara lain berupa penguatan kembali hukum adat kampung, membangun baruga adat untuk mengumpulkan masyarakat kampung, mengadakan pemetaan wilayah tanah adat dan hutan kemasyarakatan.
5.	Jaringan untuk pengembangan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat	KPMNT telah memfasilitasi anggotanya untuk mengembangkan kelembagaan pengelola ekosistem, memfasilitasi proses belajar multipihak, dan kerjasama

di Nusa Tenggara Kontak: Paskalis Nay (KPMNT)	jaringan yang peduli pada pengelolaan ekosistem. Kegiatan yang dilakukan di lapang berupa pengembangan wanatani, penerapan metodologi partisipatif, integrasi gender dalam program, dan pengembangan media komunikasi.
6. Pengembangan dialog Kontak: Natsir Abbas (FKKM Sulawesi Tengah)	FKKM di Sulteng telah memfasilitasi dialog berbagai pihak, antara lain tentang pentingnya forum multipihak, penanganan kasus Dongi-dongi oleh berbagai pihak, sosialisasi penanganan kasus illegal logging, dan penanganan cagar alam Morowali versi kabupaten. Selain itu, FKKM Sulteng juga mengadakan pelatihan penulisan dan investigasi jurnalistik lingkungan.
7. Dialog Kebijakan Multi-tataran di Lampung Kontak: Christine Wulandari UNILA Martua Sirait (ICRAF) Bediona Philipus (P3AEUI)	Proses yang dibangun adalah: <ul style="list-style-type: none"> - membangun hubungan individu, sosial dan institusi - membangun kepercayaan bersama - mengembangkan ruang dialog dan negosiasi - peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesetaraan struktural.

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

1. Penguatan kelembagaan rakyat Kontak: Serikat Petani Banyumas dan Pekalongan (Setan Balong)	Organisasi rakyat untuk mengelola hutan yang bernama SETAN BALONG ini telah melakukan kegiatan: pembentukan kelompok di desa-desa, reorganisasi kelompok tani yang lama, melakukan analisis masalah yang dihadapi petani, dan berserikat.
2. Membangun kemandirian masyarakat Kontak: LPPSLH	Menguatkan kesadaran kritis petani hutan, advokasi hutan desa, penguatan kelembagaan hutan desa, penguatan jaringan hutan desa Sudah ada Peraturan Desa tentang pengelolaan hutan.

Penelitian

1. Penelitian Perhutanan Sosial di Jawa Kontak: Didik Suhardjito (Fakultas Kehutanan IPB)	Selama melakukan penelitian, terasa sekali bahwa aparat polisi hutan masih dominan dan sulit berubah, meskipun sudah mengikuti pelatihan pendekatan partisipatif. Selain itu, di sisi masyarakat, perasaan takut dan <i>minder</i> , terhadap aparat polisi hutan, juga masih sulit berubah.
2. Penelitian wanatani damar di Krui Lampung Barat Kontak: Upik Djalín (NRM EPIQ)	Penelitian yang dilakukan dalam periode 1998 - 2001 bertujuan ingin mengetahui interaksi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam (wanatani).
3. Identifikasi sumberdaya alam dan sumberdaya sosial di Lampung Kontak: Christine Wulandari (UNILA)	Proses identifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya sosial dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat dan rekomendasi UNILA. Hasil identifikasi berhasil menemukan potensi hasil hutan non kayu di dalam dan di luar hutan.
4. Penelitian tentang luas agroforestri Kontak: Lissen Situmorang (ICRAF)	ICRAF telah menghitung luas agroforestri di Indonesia. Beberapa temuan antara lain: tidak adanya informasi spasial tentang agroforestri; wilayah kelola masyarakat tidak secara resmi terpetakan; walaupun ada pengakuan terhadap kearifan masyarakat dalam

pengelolaan hutan, tapi hanya sedikit pengakuan terhadap hak atas lahan.

Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi

- | | |
|--|--|
| 1. Kampanye media
Kontak: Rahman Dako
(Japesda Gorontalo) | Mengkampanyekan isu-isu banjir dalam empat tahun terakhir, kekeringan dan pendangkalan Danau Limboto, kasus ilegal logging, dan kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat.
Proses yang dilakukan:
- investigasi dan survei
- diskusi formal dan non formal di kampung dengan masyarakat dan stakeholder lain
- dialog interaktif di radio
- iklan layanan masyarakat di radio dan koran lokal
- penerbitan media alternatif (newsletter)
- press release
- menulis artikel di koran lokal. |
| 2. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Kutai Barat
Kontak: Jusupta Tarigan
(CIFOR) | Proses yang dikembangkan adalah (a) survei informasi data, (b) pembuatan kesepakatan dengan Pemda, (c) sosialisasi dengan stakeholder lain (masyarakat, LSM, perguruan tinggi, pemerintah dan instansi lain), (d) penyediaan alat dan pembangunan laboratorium GIS/remote sensing di Kutai Barat. |
| 3. TV lokal Sosial Forestri | Sejak tahun 1998 telah dikembangkan TV lokal yang mencakup 4 desa yang dihuni oleh 6000 KK. |

Pengembangan Analisis Kebijakan dan Resolusi Konflik

- | | |
|---|--|
| 1. Membangun dukungan kebijakan
Kontak: Rikardo (HuMa) | Pengalaman membangun dukungan kebijakan untuk sosial forestri tidak mudah. Hambatan yang dirasakan adalah adanya doktrin hirarki peraturan perundang-undangan. |
| 2. Penguatan kapasitas analisis
Kontak: Sulaiman Sembiring
(IHSA) | Pelatihan, pendampingan dan konsultasi untuk penyusunan draft peraturan, hukum dan kebijakan. |
| 3. Pengembangan Metodologi Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di desa-desa hutan di Randublatung dan Bloro
Kontak: Faisal (ARUPA) | Proses resolusi konflik yang dikembangkan adalah (a) menyepakati untuk menghentikan kekerasan selama proses resolusi konflik berlangsung, (b) pendampingan masyarakat berupa fasilitasi penyusunan micro-planning, penyebaran informasi, dan pengembangan jaringan kerja, (c) negosiasi untuk membangun kesepakatan, (d) mengembangkan dialog kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesepakatan yang telah dibangun, serta mendorong adanya kepastian hukum tentang pengelolaan sumberdaya hutan berbasis lokal, dan (e) memfasilitasi perubahan sistem kelola yang melibatkan pemda, Perhutani, desa, dan organisasi lokal. |
| 4. Kaji ulang kebijakan: Penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan | Proses yang terjadi adalah (a) mengkritisi adanya informasi yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PHBM telah diajukan oleh eksekutif kepada DPRD Dompu, (b) |

oleh Eksekutif
di Kabupaten Dompu,
NTB
Kontak: Muttakun
(YP2MD)

mempelajari Ranperda PHBM tersebut, (c) mendiskusikan Ranperda PHBM untuk mengetahui keberpihakan Pemda kepada masyarakat, (d) merekomendasikan kepada DPRD Dompu agar menunda Ranperda PHBM, dan (e) melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak eksekutif (Dinas Kehutanan Dompu) dan DPRD agar Ranperda PHBM ditunda pembahasannya karena pembahasannya tidak melibatkan stakeholder, (f) mengusulkan kepada DPRD Dompu dan Dinas Kehutanan Dompu agar mengadakan pertemuan multipihak untuk meminta masukan untuk menyempurnakan Ranperda PHBM.

LAMPIRAN 2. Kebijakan dan Program Sosial Forestri yang Dikembangkan oleh Stakeholder (Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Donor)

No.	Inisiatif	Deskripsi singkat
Kebijakan dan Program Departemen Kehutanan		
1.	Transformasi Nilai Sosial Budaya Dephut Kontak: Tetra Yanuariadi (Departemen Kehutanan)	Program ini merupakan proses untuk mengembangkan komunikasi multipihak dalam rangka perencanaan bottom up pengembangan kehutanan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah merumuskan pendekatan yang akan dilakukan, sosialisasi ke daerah, dan komunikasi multipihak di tingkat desa, kabupaten dan pusat.
2.	Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kontak: Hartati (Kasubdit Bina HKM, Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan)	Departemen Kehutanan telah menerbitkan 26 ijin HPHKM. Penerapan program HKM di 10 propinsi didukung oleh bantuan OECF. Selain itu Ford Foundation juga pengembangan kelembagaan dan forum-forum komunikasi HKM.
Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah		
1.	Kebijakan Daerah HKM Lampung Barat Kontak: Warsito (Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat)	Petani sudah mulai menanam tanaman yang disukai tanpa biaya pemerintah. Di beberapa lokasi, masyarakat telah memperoleh pengakuan dari Bupati berupa ijin sementara pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan (HKM), namun pemerintah pusat belum mengeluarkan ijin tersebut.
2.	PHBM di Kuningan Kontak: Slamet Wastra (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan) Sanusi (Ketua LPI PHBM) Makmun (Kanopi)	Kegiatan PHBM di Kuningan telah dirintis sejak tahun 2000, merupakan aktivitas kolaborasi berbagai pihak seperti masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan, PT Perhutani, LSM Visita, Kanopi, Latin, Forum PHBM tingkat Kabupaten, LPI (Lembaga Pelayanan Implementasi PHBM), pemerintah Kabupaten Kuningan, dsb. Kegiatan yang telah dilakukan adalah penyusunan rencana pengelolaan hutan desa secara kolaboratif (pemetaan, inventarisasi potensi sumberdaya alam, penguatan kelembagaan desa, dsb.), dan menyusun perjanjian kerjasama antara masyarakat dengan PT Perhutani dan pemerintah kabupaten Kuningan, untuk mengelola hutan desa.
3.	Kebijakan Daerah PSDHBM Kontak: Krustanto (DPRD Wonosobo)	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) telah disusun atas inisiatif DPRD Wonosobo bekerja sama dengan beberapa LSM. Proses yang dilakukan adalah (a) melakukan konsultasi publik dengan masyarakat desa hutan, (b) dialog dengan pakar, akademisi, LSM, Perhutani, tokoh agama, pengusaha, dan dinas terkait, (c) membuat rancangan peraturan daerah yang dikerjakan bersama dengan stakeholder, (d) pengesahan peraturan daerah, (e) membuat pedoman pelaksanaan peraturan daerah, (f) melakukan pendekatan untuk mendapatkan legitimasi/rekognisi dari pemerintah pusat

(Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Komisi III DPR RI).

4.	Kerjasama pengusaha hutan dengan masyarakat di Kabupaten Malinau Kontak: Wakil Bupati Malinau	Pemerintah Kabupaten Malinau telah melibatkan pengusaha hutan dari luar daerah untuk bekerja di Malinau, dengan melibatkan masyarakat, dan membuat kesepakatan bersama masyarakat.
5.	Perubahan kebijakan alih kelola hutan kepada masyarakat (Kutai Barat, Kaltim) Kontak: Ary Yasir (Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat)	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat ini sedang mempersiapkan instrumen, termasuk sumberdaya manusia untuk mengalihkan pengelolaan hutan kepada masyarakat.
6.	Pengelolaan hutan dan lahan secara bersama Kontak: Dinas Kehutanan Pasir	Program bertujuan untuk mencari kesepakatan dalam kewenangan pengelolaan hutan dan lahan, menyusun tata ruang dan peruntukannya, serta pemberdayaan sumberdaya manusia dan usaha tani. Kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan kawasan sentra produksi melalui sistem kemitraan.
7.	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Sika NTT) Kontak: Bp. Ruada (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, NTT)	Kegiatan yang sudah dilakukan adalah pendekatan para pihak yang terlibat dalam PHBM, lokakarya yang melibatkan para pihak, pembelajaran bersama atau studi banding yang melibatkan eksekutif, legislatif, LSM, dan masyarakat adat; inventarisasi dan identifikasi potensi hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; pelatihan fasilitator dan masyarakat pengelola hutan.
8.	HKM di Kupang Kontak: BLK Kupang	Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan HKM, dengan melakukan pelatihan untuk staf Dinas Kehutanan, serta mengembangkan jaringan kerjasama dalam Forum Komunikasi HKM.

Kebijakan dan Program Perusahaan

1.	PHBM oleh PT Perhutani Kontak: Bambang Adji (Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Perhutani)	PHBM oleh PT Perhutani didefinisikan sebagai sistem pengelolaan kolaboratif antara PT Perhutani dengan stakeholder lain, termasuk masyarakat, dimana terdapat kejelasan hak dan tanggung jawab atau peranan sesuai dengan kompetensinya. Dalam PHBM, PT Perhutani hanya menjadi fasilitator.
2.	Mewujudkan CBFM di tingkat operasional, pengalaman PT Inhutani II Kontak: Tjipta Purwita (Inhutani II)	Proses yang dilakukan meliputi: <ul style="list-style-type: none">- mendorong pelaksana operasional menerapkan program pemberdaya masyarakat, menerapkan pola PHBM/SF maupun pola-pola lain yang bersifat lokal spesifik.- menghimpun bahan-bahan/pengalaman berbagai pihak sebagai benchmark.- mendorong masyarakat untuk bekerjasama atas dasar pola kerjasama yang saling menguntungkan (<i>reciprocal relationship</i>).- selalu melakukan monitoring dan evaluasi terus

		menerus (<i>continous improvement</i>).
		- membuat panduan umum untuk membekali para manajer untuk lebih mengenal program-program pemberdayaan masyarakat.
3.	Sosial Forestri di PT Musi Hutan Persada, Kontak: PT MHP	PT Musi Hutan Persada telah mengembangkan HTI Trans (Hutan Tanaman Industri bersama Transmigran), seluas ± 300.000 ha, dimulai tahun 1991 sampai sekarang, dengan menanam jenis Akasia, dengan melibatkan 500 KK. Setiap KK mendapat lahan seluas 0,25 ha untuk tempat tinggal dan pekarangan, 1 ha lahan untuk kebun karet, dan biaya hidup 1 tahun. Transmigran berkewajiban untuk membantu kegiatan HTI dan menjaga kelestariannya. Proses yang dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pembentukan kelompok - Penetapan lokasi - Pembuatan akta - Kesepakatan - Pelaksanaan - Penunjukan pihak ketiga - Program penunjang - Pembinaan dan pelatihan.

Kebijakan dan Program Donor

1.	Perencanaan program kehutanan multipihak (Kutai Barat, Kaltim) Kontak: Sugeng Rahardjo (NRM - USAID)	Proses yang dilakukan di Kutai Barat antara lain memfasilitasi diskusi para pihak, pembentukan kelompok kerja kehutanan, menyusun potret kehutanan, skenario dan strategic planning, menyusun isu-isu strategis, internalisasi program kehutanan, dan implementasi aksi (PHL, Raperda, Dewan Adat, dll.)
2.	HKM bantuan OECF Kontak: Siswahyono (peneliti)	HKM bantuan OECF sering dipandang sebagai proyek, dimana ada keterbatasan waktu pelaksanaan yang pendek.
3.	SFDP (Social Forestry Develoment Project) di Sanggau Kalimantan Barat Kontak: Larst	Deskripsi singkat lihat: www.socialforestry.org
4.	Program Kehutanan Multipihak Kontak: Tri Nugroho (DfID Jakarta)	Tujuan program adalah mendorong inisiatif multipihak yang lebih memperkuat CBNRM/sosial forestri ke arah co-management dan local management. Proses multipihak dibutuhkan karena ada <i>ecological driven</i> , <i>economical driven</i> , <i>institutional driven</i> , dan <i>social driven</i> . Selama hampir 3 tahun, program ini berhasil membuktikan bahwa co-management semakin dibutuhkan, local management semakin banyak, dan dialog multipihak semakin dibutuhkan.

LAMPIRAN 3. Daftar Peserta

No. Institusi	Nama dan Alamat	Kelompok
1. ACM-CIFOR Steering Committee	Erwidodo Kompleks IPB Baranangsiang III, Blok B-12 - Bogor 16144 Telp. 0251 313104 (H) E-mail: erwidodo@indo.net.id	Peserta - Peneliti
2. APIK (Aliansi LSM Pendukung Implementasi, Sistem Pengelolaan Hutan Kolaboratif)	Rustam Tirtakusumah Komplek Antabaru II, JI Antanila I Blok F no 9 Cisaranten Kulon, Bandung 40293. Tel/Fax: (022) 7815958 E-mail: apikyes@yahoo.com poklan@bdg.centrin.net.id	Peserta - NGO
3. Balai Latihan Kehutanan Kupang	Budy Zet Mooy Widyaswara BLK Kupang Balai Latihan Kehutanan Kupang JI. Untung Surapati P.O. Box 76, Kupang, NTT Tel: 0380 833129, HP 0812 3662561 Fax: 0380 829329	Peserta - Pemerintah
4. BAPPEDA Bungo	Safrizal Kabid. Fisik dan Prasarana Kantor Bappeda JI. RM Thaher no. 504. Bungo, Jambi Tel: 0747 21476 Fax: 0747 323368	Peserta - Pemerintah
5. BAPPEDA Lampung	Gamal Pasya Bappeda Lampung (Koordinator NSS-Lampung)/ICRAF c/o ICRAF Bogor P.O Box 161, Bogor 16001	Peserta - Pemerintah
6. BAPPEDA Malinau	Bid Ingkan Kantor Bappeda Malinau Kalimantan Timur	Peserta-Pemerintah
7. BCI (Biodiversity Conservation Indonesia)	Riyadi Sigit Pamungkas BCI, JI. Sirnasari II No. 22 Sindangbarang, Bogor Tel/fax: 0251 628904 E-mail: bci@bogor.wasantara.net.id	Peserta - NGO
8. Bupati Gorontalo	Ahmad Hoesa Pakaya Kantor Bupati Kab. Limboto, Gorontalo Tel: 0435 881482 Fax: 0435 880142	Peserta - Pemerintah
9. CAPABLE (Center for Capacity Building for Local Governance)	Sih Yuniati CAPABLE, Graha Mustika Ratu, Annex Floor JI. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta Tel: 021 8306582 Fax: 021 8306581 E-mail: capable@cbn.net.id	SC & facilitator

10. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Yurdi Yasmi CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: y.yasmi@cgiar.org	SC & facilitator
11. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Herry Purnomo CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: h.purnomo@cgiar.org	SC
12. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Moir Moeliono CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: m.moeliono@cgiar.org	SC & facilitator
13. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Tony Djogo CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: T.Djogo@cgiar.org	SC
14. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Lini Wollenberg CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: l.wollenberg@cgiar.org	SC
15. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Yanti Kusumanto CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: y.kusumanto@cgiar.org	Peserta - Peneliti
16. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Yayan Indriatmoko CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680. Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: y.indriatmoko@cgiar.org	Peserta - Peneliti
17. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Stepi Hakim CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: s.hakim@cgiar.org	SC & Facilitator
18. Center for International Forestry Research	Hasantoha Adnan CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680	Peserta - Peneliti

(CIFOR)	Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: h.adnan@cgjar.org	
19. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Herlina Hartanto CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680. Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: h.hartanto@cgjar.org	Peserta - Peneliti
20. Center for International Forestry Research (CIFOR)	David Kaimowitz CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: d.kaimowitz@cgjar.org	Pembicara
21. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Chris Barr CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: c.barr@cgjar.org	Peserta - Peneliti
22. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Ramses Iwan C/o CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100	Peserta - Peneliti
23. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Made Sudana C/o CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100	Peserta - Peneliti
24. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Godwin Limberg C/o CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680 Tel: 0251-622622 Fax: 0251 622100	Peserta - Peneliti
25. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Steve Rhee CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680. Tel: 0251-622622 Fax: 0251 622100 E-mail: s.rhee@cgjar.org	Peserta - Peneliti
26. Center for International Forestry Research (CIFOR)	Jusupta Tarigan CIFOR, Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang - Bogor 16680. Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: j.tarigan@cgjar.org	Peserta - Peneliti
27. Dalhousie University	Tania Li Dept. of Sociology and Social Anthropology Dalhousie University	Reviewer

Halifax, N.S., Canada B3H 3J5
Phone: 902-494-3689
E-mail: Tania.Li@Dal.Ca

28. DAMAR - HKM Jogja	Abidah Billah Setyowati Direktur Eksekutif, DAMAR Nologaten, Gg. Kenari 225, Yogyakarta Tel/Fax: 0274 523850 E-mail: abidebrille@yahoo.com, damaryogya@ygy.centrin.net.id	Peserta - NGO
29. Departemen Kehutanan	Wahyudi Wardoyo Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 3 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat Telp: 021 5704501 Fax: 021 5738732	Pembicara
30. Departemen Kehutanan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan	Suhariyanto Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Ditjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 5 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tel: 021 5730240 Fax: 021 5733336	Peserta - Pemerintah
31. Departemen Kehutanan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Hardiman Dit. Konservasi Kawasan, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat Fax/Tel: 021 5720229	Peserta- Pemerintah
32. Departemen Kehutanan - BAPLAN	Sudjoko Prajitno Perencana Madya pada Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Badan Planologi Kehutanan Manggala Wanabhakti Blok I, Lt. 7 Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Tel: 021 5730304 Fax: 021 5734632	Peserta - Pemerintah
33. Departemen Kehutanan Ditjen Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial	Soetrisno Direktur Bina Hutan Kemasyarakatan Ditjen Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Dephut Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 12 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Tel: 021 570 4501-04 Fax: 021 5731839/5737092	Pembicara
34. Departemen Kehutanan Ditjen Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)	Erna Rosdiana Kepala Seksi Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan pada Sub Dit. Pemberdayaan Masyarakat, Eselon IV pada Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan Ditjen Rehabilitas	OC & fasilitator

Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)
Dephut, Manggala Wanabhakti Blok
Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Tel: 021 573 0110

-
- | | | |
|--|---|----------------------|
| 35. Departemen Kehutanan
Ditjen Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial | Sami Rahardjo
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung
Dit. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan,
Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial,
Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 13
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Tel: 021 5730184
Fax: 021 5733431
E-mail: sami_rhj@yahoo.com | Peserta - Pemerintah |
|--|---|----------------------|
-
- | | | |
|--|---|----------------------|
| 36. Departemen Kehutanan
Karo Humas | Agus Wahyudi
Kantor Pusat Informasi Kehutanan
Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabhakti Lt. 1
Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan
Jakarta Pusat
Tel: 021 5730211/5730634
Fax: 021 5720213
E-mail: karo.humas@dephut.cbn.net.id | Peserta - Pemerintah |
|--|---|----------------------|
-
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 37. Departemen Kehutanan
Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan | Wiroididjojo Soeparno
Kepala Bidang Program dan Evaluasi
Penyuluhan Kehutanan, Pusat Bina Penyuluhan
Kehutanan, Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 8,
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Tel/Fax: 021 5720 228 | Peserta - Pemerintah |
|---|---|----------------------|
-
- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 38. Departemen Kehutanan SAM 2 | Dwi Sudharto
Bidang Pembangunan Kehutanan (SAM II)
Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabhakti Lt. 3
Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Fax: 021 5720213
Tel: 021 5730201
E-mail: sam02@dephut.cbn.net.id | Peserta - Pemerintah |
|--------------------------------|--|----------------------|
-
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 39. Departemen Kehutanan
Biro Perencanaan dan Keuangan | Tetra Yanuariadi
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Biro Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 2,
Jalan Gatot Subroto - Senayan
Jakarta Pusat
Tel: 021-5730142
Fax: 021 573 8519
E-mail: tetra@dephut.cbn.net.id | Peserta - Pemerintah |
|---|---|----------------------|
-
- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 40. Department for International | Tri Nugroho
DfID, Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 6, | SC & facilitator |
|----------------------------------|---|------------------|

Development (DfID)	Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: 021 5720225 Fax: 021 570 4401 E-mail: treenug@dfid.or.id	
41. Department for International Development (DfID)	Yvan Biot Koordinator Program Kehutanan Multi-Stakeholder, DfID Gedung Manggala Wanabakti Bl. VII Lt. 6 Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: 021 5720225, 5710467 Fax: 021 570 4401 Email : yvanbiot@cbn.net.id forfield@dfid.or.id	Peserta - Donor
42. Department for International Development (DfID)	Nonette Royo Fasilitator Daerah, DfID Gedung Manggala Wanabakti Bl. VII Lt. 6 Tel: 021 5720225, 5710467 Fax: 021 570 4401	Peserta - Donor
43. Department for International Development (DfID)	Maria Latumahina Swary Utami Dewi Fasilitator Daerah, DfID Gedung Manggala Wanabakti Bl. VII Lt. 6 Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: 021 5720225, 5710467 Fax: 021 570 4401	Peserta - Donor
44. Desa Baru Pelepat	Hamdan Kepala Desa Baru Pelepat Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi	Peserta - Masyarakat
45. Dinas Kehutanan Bungo	Iman Budisetiawan Pelaksana, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo Jl. RM Thaher No. 607, Muara Bungo Jambi Tel: 0747 21444 / 21473 Fax: 0747 21473 E-mail: iman-thole@yahoo.com	Peserta - Pemerintah
46. Dinas Kehutanan Dompu	Burhanuddin H Usman Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Dompu home: Jl. Soekarno-Hatta No. 27 Kel. Bada Dompu, NTB Tel: (rumah) 0373 21042, HP 0811390471; (kantor) 0373 21478, 21803	Peserta - Pemerintah
47. Dinas Kehutanan Kabupaten Kuningan	H. Slamet S. Wastra Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Kuningan Pemerintah kabupaten Kuningan Jl. Siliwangi No. 88, Kuningan 45512 Tel: 0232 871045 Fax: 0232 871052	Peserta - Pemerintah
48. Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka	R. Ruamat Pelang Kepala Dinas	Peserta - Pemerintah

	Dinas Kehutanan kabupaten Sikka JI. Jendral Sudirman Tel: 0382 22267; Fax: 0382 21025	
49. Dinas Kehutanan Kutai Barat	Ary Yasir Philipus Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat JI. A. Yani (kantor Dishut) Tel: 0545 41037 / 0812 5810411	Peserta - Pemerintah
50. Dinas Kehutanan Lampung Barat	Warsito Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat Fax: c/o ICRAF 0828 725273	Peserta - Pemerintah
51. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan	H. Dailami Airo Kepala Sub Dinas Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan JI. A. Yani Timur No. 14, Banjarbaru Tel: 0511 777534 Fax: 0511 772234 E-mail: dishutkalsel@indo.net.id; dishutkalsel@email.com	Peserta - Pemerintah
52. Dinas Kehutanan Pasir	Aswan Noor Kasi. Penghijauan, Konservasi Tanah dan Reboisasi Dinas Kehutanan kabupaten Pasir JI. Jendral Sudirman No. 167B, Tanah Grogot 76211. Tel/Fax 0543 22558 E-mail: dk-psr@indo.net.id	Peserta - Pemerintah
53. DPRD Dompu	Nasaroeddin Hasan Wakil Ketua DPRD Komisi B Kabupaten Dompu JI. Soekarno Hatta 17, Dompu, NTB 84211 Tel: 0373 21036 / 21520 (office); 22477 (home)	Peserta - Pemerintah
54. DPRD Wonosobo	Krustanto DPRD kabupaten Wonosobo JI. Sindoro No. 6, Wonosobo 56311 Tel: 0286 321546 / 329139 Fax: 0286 321546 E-mail: krust.c.@yahoo.com	Peserta - Pemerintah
55. Evergreen Indonesia	Dedeng Alwi Evergreen Indonesia JI. Sungai Sausu No. 5, Palu - Sulteng 94223 Tel/Fax. 0451 424354 E-mail: evergreen@palu.wasantara.net.id dedengalwi@yahoo.com	Peserta - NGO
56. FKKM Masyarakat Gunung Kidul	Sapardiyono Koordinator FKKM Faswil DIY JI. Puntodewo No. 53 Gadingan- Wates, Yogyakarta 55611 Tel: 0274 778282 Fax: 0274 778282 HP 08122708087 E-mail: spdiyono@telkom.net	Peserta - Masyarakat

57. FKKM Sulteng	M. Natsir Abbas Jl. Basuki Rahmat No. 121 Palu, Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451 481935	Peserta - Masyarakat
58. Ford Foundation	Ujjwal Pradhan Ford Foundation, S. Widjojo, 11th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190 Telp: 021 2524073 Fax: 021 2524078 E-mail: U.Pradhan@FordFound.org	SC
59. Forest Watch Indonesia	E.G. Togu Manurung Direktur Forest Watch Indonesia Jalan Sempur Kaler No. 7. Bogor. Tel: 0251 620754 Fax: 0251 317926 E-mail: mtogu@indo.net.id; fwi@indo.net.id	Peserta - NGO
60. Forest Watch Indonesia Region Papua	Lyndon B. Pangkali Koordinator Forest Watch Indonesia Region Papua KPR BTN Yotefa Permai, Jl. Dao, Blok C-69, Waena, Jayapura - Papua Tel: 0967 582681/584670/573740 (home) E-mail: forest@jayapura.wasantara.net.id	Peserta - NGO
61. Forestry Research and Development Agency (FORDA)	Hadi S. Pasaribu Direktur jenderal Badan Penelitian dan pengembangan kehutanan Manggala Wanabhakti Block I, 11th Fl. Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: 021 5730390 / 5737945 Fax: 021 572 0189 E-mail: tu_litbang@dephut.cbn.net.id Kabatan.litbang@dephut.cbn.net.id	Pembicara
62. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat	San Afri Awang Sekretariat FKKM Jl. Nologaten Gg.Kenari No.225 Depok Sleman Yogyakarta 55281 Tel/Fax: 0274 523850; HP 0811 267010 E-mail: S_awang@indo.net.id Fkkm_jog@indo.net.id	Pembicara
63. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)	Diah Raharjo Bukit Permata Sari Blok A3 No. 16 - Bogor Tel: 0251 659414 / 653240 Fax: 0251 659418 E-mail: draharjo@indosat.net.id	SC, fasilitator, pembicara
64. Gerbang Massa Nusantara	Hariyono Soeroso Ketua Gerbang Massa (Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa) Komplek Kehutanan Selakopi Kav A2, Pasirmulya, Bogor Tel: 0251 630317 Fax: 0251 630735	Peserta - NGO

65. Gita Pertiwi	Berdy Stevens Gita Pertiwi, Jl. Griyan Lama No.20 Baturan, Solo 57171 Tel: 0271 710465 Fax: 0271 718956 EMail: gita@indo.net.id berdy_stevens@yahoo.com	Peserta - NGO
66. Greencom	Henny Buftheim Senior Communication specialist, GreenCom, Strategic Environmental Communication. Ratu Plaza Building, 17th floor Jl Jend Sudirman 9, Jakarta 10270 Telp: 021 7209596 Fax: 021 7222958 E-mail: hbuftheim@greencom.or.id	Peserta - NGO
67. Greencom	Erwina Darmajanti Environmental Communication Training Specialist, GreenCom, Strategic Environmental Communication. Ratu Plaza Building, 17th floor Jl Jend Sudirman 9, Jakarta 10270 Telp: 021 7209596 Fax: 021 722 2958 E-mail: erwina@greencom.or.id	Peserta - NGO
68. HUMA	Rikardo Simarmata Kordinator Pengembangan Program Jl. Jatimulya IV No. 21, Jati Padang, Pasar Minggu - Jakarta Tel: 021 78845871 Fax: 021 7806094 Email: psdhm@indo.net.id, imarmata@cbn.net.id	Peserta - NGO
69. HUMA	Didin Suryadin Kordinator Program Informasi Dokumentasi Jl. Jatimulya IV No. 21, Jati Padang, Pasar Minggu - Jakarta. Tel: 021 78845871 Fax: 021 7806094 E-mail: d_suryadin@cbn.net.id	Peserta - NGO
70. ICRAF International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)	Lisken Situmorang ICRAF, Jl. CIFOR, Situgede Sindangbarang, Bogor 16680 Tel: 0251 625416 Fax: 0251 625415	Peserta - Peneliti
79. ICRAF International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)	Martua Sirait ICRAF, Jl. CIFOR, Situgede Sindangbarang, Bogor 16680 Tel. 0251 625416 Fax: 0251 625415 E-mail: m.sirait@cgjar.org	SC
71. ICRAF International Centre	Chip Fay ICRAF, Jl. CIFOR,	Peserta - Peneliti

for Research in Agroforestry (ICRAF)	Situgede Sindangbarang, Bogor 16680 Tel: 0251 625416 Fax: 0251 625415	
72. ICRAF International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)	Nurka Cahyaningsih (Yaya) Field Coordinator Site Sumber Jaya, ICRAF Jl. Simpang Gadis, sebelah Puskesmas Sumber Jaya 34871 Tel: 0828 724680 Fax: 0828 725273	Peserta - Peneliti
73. IHSA (Institut Hukum Sumberdaya Alam)	Sulaiman Sembiring Direktur Eksekutif, IHSA Jl. Intan I No. 40 Cilandak Barat 12430 Jakarta Selatan - Indonesia Tel: 021 75903617, 75903618 Fax: 021 7500475 E-mail: ihsa@indo.net.id soel@indo.net.id Website: www.ihsa.or.id	Peserta - NGO
74. INHUTANI II Tjipta Purwita	Tjipta Purwita Direktur Pengembangan, PT. INHUTANI II Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Tel: 021 573 7094 - 95, 5737095, 5721331 Fax: 021 573 3790	Peserta - Pengusaha
75. INHUTANI II	Rulyatna Purnama Kaiin Staff Khusus II Lingkungan dan Sosial PT INHUTANI II Gd. Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 13 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Tel: 021 5737094 - 95, HP 0816820607 Fax: 021 5733790	Peserta - Pengusaha
76. Institut Pertanian Bogor (IPB)	Hariadi Kartodihardjo Fakultas Kehutanan, IPB, Darmaga, Bogor Tel: 0251 621285/622905 (H) Fax: 0251 622905 (H) Email: hariadi@indo.net.id	Reviewer
77. Institut Pertanian Bogor (IPB)	Nurheni Wijayanto Dosen, Fak. Kehutanan IPB Lab. Poleksos Kehutanan Kampus IPB Darmaga, PO Box 168, Bogor Tel/fax: 0251 623805 hp 0812 8424546 E-mail: akecuina@cbn.net.id	Peserta Perguruan Tinggi
78. Institut Pertanian Bogor (IPB)	Didik Suharjito Lab. Sosekhut, Fakultas Kehutanan IPB PO Box 168, Bogor Tel: 0251-623805/621677 Fax: 0251-623805/621256 E-mail:sosekhut@indo.net.id	Peserta Perguruan Tinggi
79. JAPESDA (Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber	Rahman Dako Koordinator, JAPESDA Jl. Ternate No. 120, Kompleks SMK I,	Peserta - NGO

Daya Alam)	Kota Gorontalo. Fax/Tel: 0435-825611 E-mail:Kelolagtlo@yahoo.com	
80. Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) Kutai Barat	Paulus Kadok Koordinator Internal, Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kubar Jl. Wiratama Gg I RT I RW I, Samarinda Tel: 0812 5501644 E-mail: kilip@samarinda.org	Peserta - NGO
81. Kelompok Mitra Pelestarian Hutan (KMPH) Mitra Sesaut	Abdurrahman Ketua, KMPH " Mitra Sesaut" Dusun Jurang Malang, Lebah sempaga kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTT 83371. d/a Konsepsi	Peserta-Masyarakat
82. KKIP - Gorontalo	Marianti Sumo Jl. Ternate No. 120, Kompleks SMK 1 Kota Gorontalo Telp/fax: 435-825611 HP 0811 431638 E-mail: kelolagtlo@olami.net.id kkip@gmx.co.uk	Peserta - NGO
83. KKIP Multipihak	Helmayetti Hamid KKIP Multipihak, Jl. Astrajingga No. 7 Indraprasta, Bogor Phone/Fax: 0251 337417 HP 0812 9962013 E-mail: helmahamid@yahoo.com	Peserta - NGO
84. KONSEPSI (Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi)	Witardi Konsepsi Mataram Jl. Bung Hatta II/6, Mataram 83231 Lombok, NTB Tel: 0370 627386 Fax: 0370 627386; E-mail: konsepsi@mataram.wasantara.net.id	Peserta - NGO
85. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK)	Muayat Ali Muhshi KpSHK, Jl. Arzimar III No.17, Bogor 16152 Tel : 0251 380301, HP 0811111796 Fax: 0251 380967 E-mail: kpskh@indo.net.id muayat@indo.net.id; Website: www.kpskh.org	SC
86. Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara(KPDTNT)	Paskalis Nai Sekretaris Umum Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) Jl. Ade Irma II No 30, Walikota Baru, Kupang 85228 Tel: 0380 825028, HP 08123776359 Fax: 0380 825028 E-mail: kpmnt@kupang.wasantara.net.id sdm-nt@kupang.wasantara.net.id	Peserta - NGO
87. KAIL	Nurhadi Jl. Manggar No.89 Tegalsari, Ambulu, Jember Tel: 0336 881416	Peserta - NGO

88. Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)	Arif Aliadi LATIN, Jl. Sutera Gg.Parkit No.31 RT.01/03 Desa Situ Gede, Sindang Barang Jero Bogor Barat Tel: 0251 420522 - 23, HP 08121102660 Fax: 0251 626593 E-mail: latin@latin.or.id	SC & Facilitator
89. Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) Sukabumi	Ahmad Suwarno LATIN Sukabumi/Bogor Jl. Dewi Sartika No. 1415 Kp. Jamban Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364 HP 08128236492	Peserta - NGO
90. Lembaga Arupa	Faisal H. Fuad Direktur Lapangan, Yayasan Arupa Karangwuni H- 5A, Jl. Kaliurang km. 5 Yogyakarta 55281 Tel: 0274 518589 Fax: 0274 518589 E-mail: arupa@indosat.net.id	Peserta - NGO
91. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)	Suhardi Suryadi LP3ES, Jl. S. Parman No. 81, Jakarta 11420 Kotak Pos 1493 JKT, Jakarta 10002 Tel: 021 5674211 - 13; 5667139; 55630233 Fax: 021 5683785 E-mail: lp3es@lp3es.or.id	Reviewer
92. LPPSH (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup)	Rahman Rosyidi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Jl. Jatisari no. 28, Sumampir - Purwokerto 53125 Telp/Fax: 0281 623117 E-mail: lp3esh@indo.net.id	Peserta - NGO
93. Masyarakat Batu Kerbau	Tafrizal Kepala Desa Batu Kerbau Kec. Pelepat, Kab. Bungo-Jambi d/a Bapak Riadarma (Erry Malalo) Koordinator CBFM Jambi, WARSI Jl. Teuku Umar No. 24 Rt.09 Rw. 03 Kel. Pematang Kandis, Bangko - Jambi Tel: 0746-21508 Fax: 0746-322178	Peserta - Masyarakat
94. Masyarakat Benung	Firdaus Wakil Masyarakat Benung, d/a SHK Kaltim Jl. Juanda, Komp. Wijayakusuma Rt. 19 Rw. 04 No. 97, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda 75124 Kalimantan Timur Tel./Fax: 0541 206565	Peserta - Masyarakat
95. Masyarakat Bualemo	Anwar Dua d/a KKIP, Marianti Sumo Jl. Ternate No. 120, Kompleks SMK 1 Kota Gorontalo Telp/fax: 0435-825611	Peserta - Masyarakat

E-mail: kelolagtlo@olami.net.id
kkip@gmx.co.uk

96. Masyarakat Gunung Betung	Sari'an d/a P3AE-UI, Pesona Depok Estate Blok I/12 Depok 16431 Tel/Fax: 021 7773854 E-mail: P3AEUI@indo.net.id	Peserta - Masyarakat
97. Masyarakat Katu	Ferdinand Lumeno Wakil Masyarakat Katu d/a Yayasan Tanah Merdeka Jl. Tanjungmanimbaya No. 111 B, Palu Tel/Fax: 0451 425892 E-mail: hinoe@palu.wasantara.net.id	Peserta - Masyarakat
98. Masyarakat Meru Betiri	Suparno Koordinator Ketua-ketua Kel. Rahab. Desa Sanenrejo, d/a LATIN - KAIL Jember Jl.Manggar No.89 Tegal Sari Ambulu Tel: 0336 881416 E-mail: latinjember@jember.wasantara.net.id	Peserta - Masyarakat
99. Masyarakat Rantau Buta	Darmansyah Kepala LKMD Wakil Masyarakat Rantau Buta Tanah Grogot, Kaltim	Peserta - Masyarakat
100. Masyarakat Rantau Layung	Padliansyah Pjs Kepala Desa Wakil Masyarakat Rantau Layung Tanah Grogot, Kaltim	Peserta - Masyarakat
101. Masyarakat Rarangunao Palu	Lakapa Ketua Badan Pekerja Aliansi Masyarakat Adat Kambuno Desa Loru, Kecamatan Biromaru, Kab. Donggala Sulteng d/a Evergreen Indonesia Jl. Sungai Sausu No. 5, Palu Sulawesi Tengah 94223 Tel/Fax: 0451 424354 E-mail: evergreen@palu.wasantara.net.id	Peserta - Masyarakat
102. Masyarakat Sumber Jaya	Erfan Wakil Masyarakat Sumber Jaya d/a ICRAF, Jl. Simpang Gadis, Sebelah Puskesmas Sumber Jaya Lampung Barat 34871 Tel: 0828 724680 Fax: 0828 725273	Peserta - Masyarakat
103. NECTAR Indonesia	Muslimin Nasution Kompleks BULOG No. A-20J Jalan H. Ten, Kayu Putih Jakarta Timur 13210 Tel: 021 4713769 Fax: 021 4896438 E-mail: mnst@cbn.net.id musliminnst@hotmail.com	Pembicara

104.NECTAR Indonesia	Dedi Haryadi NECTAR Indonesia Jl. Utan Kayu No. 20A, Jakarta 13120 Tel: 021 8581946 Fax: 021 8581946 / 8500259 Email: daydih@yahoo.com	Peserta - NGO
105.NRM/EPIQ Kaltim	Sugeng Raharjo Planning Specialist, NRM/EPIQ Kaltim Jl. Gamelan 2 A, Samarinda Kaltim Tel: 0541 750721 Fax: 0541 203049 Email: sugengr@samarinda.org	Peserta Development Project
106.P3AE-UI	Iwan Tjitradjaja P3AE-UI, Pesona Depok Estate Blok I/12, Depok 16431 Tel/Fax: 021 777 3854 E-mail: P3AEUI@indo.net.id iwantj@bogor.net.id	Facilitator
107.P3AE-UI	Suyatno Pendamping masyarakat, Desa Sungai Langka. c/o P3AE-UI, Pesona Depok Estate Blok I No. 12, Depok. Tel/Fax: 021 7773854	Peserta Perguruan Tinggi
108.P3AE-UI	Bediona Philipus Manajer Fasilitas, c/o P3AE-UI, Pesona Depok Estate Blok I No. 12, Depok. Tel/Fax: 021 7773854	Peserta Perguruan Tinggi
109.Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO)	Mirkoen Awaly d.a PHJO-UGM Jl. Agro, Bulaksumur, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 55281 Tel: 0274 545 640, 0351 466741 Fax: 0274 545 640 E-mail: bangisa@yahoo.com	Peserta - Masyarakat
110.PHJO (Program Pengelolaan Hutan Jati Optimal)	Ratna Kusuma Sari Peneliti, UGM, Fakultas Kehutanan Jl. Agro, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Tel: 0274 545640 / HP 0812 2723384 Fax: 0274 545640 E-mail: kusumasari@indo.net.id	Peserta Perguruan Tinggi
111.PPSHK Kalbar	Pius Daren PPSHK KALBAR Jl. Budi Utomo Komp. Bumi Indah Khatulistiwa Blok. A4/5, Siantan, Pontianak 78241, Kalimantan Barat Tel/Fax: 0561 885725 E-mail: tembawang@pontianak.wasantara.net.id	Peserta - NGO

112.PSHK-ODA	Fauzi Syam Direktur, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA) Jl. Tulip II Block B3, Rawasari Kota Baru Jambi 36125 Tel: 0741 60100/65565/40537, HP 0811745513 Fax: 0741 33996 E-mail: pshkoda@yahoo.com	Peserta - NGO
113.PSHK-ODA	Ahmad Albar Fasilitator lapangan, d/a Jl. Semagi, Lorong Saiyo No.42, RT23/8 Kelurahan Bungo Timur, Muara Bungo, Jambi Tel: 0747 323571	Peserta - NGO
114.PT InterMatrix Bina Indonesia	Wimar Witoelar PT InterMatrix Bina Indonesia Dutamas Fatmawati #C2-19, Jakarta 12150 Tel: 021 72790028/29/30/31 Fax: 021 7229994/7506524 E-mail: wimar@perspektif.net yani@intermatrix.co.id	Moderator
115.PT Musi Hutan Persada	Edi Purwanto Kepala Divisi, Penanaman, PT Musi Hutan Persada Jl. Residen H.A. Rozak No. 99 Palembang 30114. Tel: 0711 718 101 Fax: 0711 718 102 Email: mayalioe@mdp.co.id HQ: PT. Musi Hutan Persada Wisma Barito Pacific Fl. 6B, Jl S. Parman Kav 62-63 Jakarta, Indonesia Tel: 021 570 7048 Fax: 021 548 2439	Peserta - Pengusaha
116.PT Perhutani	Bambang Adji Sutjahjo Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan, PT Perhutani (Persero) Gd. Mangala Wanabakti Blok. VII Lt. 11 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat Tel: 021 5721282 ext. 1115; 1117 (sekretaris) HP 0811927978 Fax: 021 5746734 /5732451 E-mail: bambangadji@perhutani.net Website: www.perhutani.co.id	Pembicara
117.PT Wira Karya Sakti Jambi	Aris Adhianto Director Forestry Department PT Wira Karya Sakti, Wisma BII Menara 2 JL. Thamrin 51, Lt. 32 Telp: 021 39834473, HP 081 1161463 Fax: 021 39834707 E-mail: ariadhi@cbn.net.id	Peserta - Pengusaha

118. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan & Konservasi Alam Bogor	Sumarhani Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor	Peserta - Pemerintah
119. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan & Konservasi Alam Bogor	Suyono Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor	
120. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan & Konservasi Alam Bogor	Sri Suharti Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor	Peserta - Pemerintah
121. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan - Bogor	A. Ngaloken Gintings Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor Tel: 0251 633944/633378, HP 08129148926 Fax: 0251 633944/633413 E-mail: kapuspse.litbang@dephut.cbn.net.id	Peserta - Pemerintah
122. Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya	Alfan Miko Pendamping Masyarakat Mahat Komplek Pelangi Indah B2 No. 3 Korong Gadang, Padang 25156 Tel. 0751 498 445, HP 0811 667529	Peserta - NGO
123. Regu Kerja Forest Land Tenure	Iman Santoso Regu Kerja Forest Land Tenure Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 6 Jakarta Tel: 021 5720691	Peserta - NGO
124. RIAK BUMI	Ade Jumhur Field Manager, Yayasan Riak Bumi Jl. Putri Dara Hitam Gang Tani I No. 26 Pontianak 78116, West Kalimantan, Indonesia Tel./Fax. 02-561-737132 E-mail: riakbumi@pontianak.wasantara.net.id	Peserta - NGO
125. Serikat Petani Banyumas Pekalongan	Bambang Suharso d/a LPPSLH, Jl. Jatisari no. 28, Sumampir - Purwokerto 53125 Telp/Fax. 0281 - 623117 E-mail: lppslh@indo.net.id	Peserta - Masyarakat
126. SFDP Sanggau	Lars Gunnar Blomkvist Social Forestry Development Project P.O. Box 134, Sanggau, Kalbar Tel: 0564 21025 Fax: 0564-21075	Peserta Development Project
127. SHK Kaltim	Nopilus SHK Kaltim (East Kalimantan Foundation for Revitalizing Based Forest Management System) Jl. Juanda, Komp. Wijayakusuma Rt. 19 Rw. 04 No. 97, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda 75124 Kalimantan Timur	Peserta - NGO

Tel/Fax: 0541 206565;
E-mail: simpukng@shk.or.id

128.SMCP-GTZ	Hadi Daryanto Forest Policy Assistant, SMCP-GTZ Gedung Manggala Wanabhakti, blok VII, It. 6 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Tel: 021 5720214, HP 0812 9323368 Fax: 021 5720193 E-mail: smcphd@cbn.net.id	Peserta Development Project
129.Telapak	A. Halim Koordinator Program Hutan Jawa Yayasan telapak Indonesia Jl. Sempur Kaler 16, Bogor 16154 Tel: 0251 320792 Fax: 0251 351069 E-mail: telapak@indo.net.id	Peserta - NGO
130.Universitas Bengkulu	Siswahyono Staff Pengajar Jurusan Kehutanan Fak. Pertanian, Universitas Bengkulu Jl. Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371 Tel: 0736 25435, 21170 (pswt 209) Fax: 0736 22105	Peserta Perguruan Tinggi
131.Universitas Gadjah Mada	Pujo Semedi Staf Pengajar Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, UGM Bulaksumur, Yogyakarta Tel: 0274 513096; 895604 (H) Email: psemi@fmg.uva.nl	Peserta Perguruan Tinggi
132.Universitas Gajah Mada	Sofyan P. Warsito Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta Tel: 0274 512102 Fax: 0274 550541 E-mail: Sofyanwarsito@hotmail.com	Peserta Perguruan Tinggi
133.Universitas Gorontalo	Irwan Bempah Ketua Jurusan Kehutanan, Fak. Pertanian, Universitas Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.247, Limboto Kab. Gorontalo Tel: 0435 880678 / 881369, HP 0812 4468256 Fax: 0435 880370 E-mail: irwanbempah@yahoo.com	Peserta Perguruan Tinggi
134.Universitas Hasanuddin	Syamsu Alam Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin Jl. Sunu Blok CX - 13, Ujung Pandang 90213 Tel/Fax: 0411 585 917 HP: 0811 447810	Peserta Perguruan Tinggi

		E-mail: hutan_unhas@yahoo.com	
135. Universitas Jambi	Muhammad Ridwansyah Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat Tel/Fax: 0741 53317 E-mail: ridwansyah@eudoramail.com	Peserta Perguruan Tinggi	
136. Universitas Lampung	Christine Wulandari Staf Pengajar Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian UNILA Lampung D/a WWF Indonesia Tel: 021 5761067, HP 0812 8209075 Fax: 021 5761080 E-mail: cwulandari@wwf.or.id	Peserta Perguruan Tinggi	
137. Universitas Mulawarman Center for Social Forestry PERUSDA Kehutanan Kutai Timur	Apriadi Djamhuri Gani UPT. Perhutanan sosial Universitas Mulawarman Jalan Kihajar Dewantara - Kotak Pos 1343 Samarinda 75123 East Kalimantan Tel / Fax: 0541 201275 E-mail: csf@samarinda.org	Peserta Perguruan Tinggi	
138. Universitas Mulawarman Center for Social Forestry	G. Simon Devung Kepala UPT Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman Gedung Pascasarjana Kehutanan Jalan Kihajar Dewantara - Kotak Pos 1343 Samarinda 75123 Tel: 0541 201275 Fax: 0541 206407	Peserta Perguruan Tinggi	
139. Universitas Mulawarman Center for Social Forestry	Mustofa Agung Sardjono Pengajar/Peneliti, Fahutan Unmul/ CSF Gedung Pascasarjana Magister Kehutanan Kampus Gn. Kelua, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 7 P.O. Box 1343, Samarinda 75123 Tel/fax: 0541 201275 ; 206407 E-mail: ma_sardjono@yahoo.com.au	Peserta Perguruan Tinggi	
140. University of California	Nancy Lee Peluso Environmental Social Science Department of Environmental Science, Policy and Management Division of Resource Institutions, Policy and Management, 135 Giannini Hall, MC # 3312 University of California, Berkeley, CA 94720-3112, USA Tel: +1 (510) 643 2797 fax: +1 (510) 643 2798 E-mail: npeluso@nature.berkeley.edu	Pembicara	
141. WALDA - HKM Toraja	L. Sombolinggi Direktur WALDA, HKM Toraja Tanete Kindon, Lembong Madondon, Kabupaten Tana Toraja. P.O Box 68, Rantepao. Tel/Fax: 0423 24666 E-mail: denupa@indosat.net.id	Peserta - NGO	

142. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)	Longgena Ginting WALHI Jl. Tegal Parang Utara 14, Jakarta 12790 Tel: 021 7941672 Fax: 021 794-1673; Email: walhi@walhi.or.id	Peserta - NGO
143. Warsi	Rahmat Hidayat Deputy Director Eksekutif Warsi (Conservation Information Forum) Jl. Teuku Umar No. 24 Rt.09 Rw. 03 Kel. Pematang Kandis, Bangko - JAMBI P.O. Box 28/BKO 37312, Jambi Tel: 0746 21508 Fax: 0746 322178 E-mail: warsi@warsi.or.id Website: warsi.or.id	Peserta - NGO
144. WARSI	Riyadharna Koordinator CBFM Jambi WARSI, Jl. Teuku Umar No. 24 Rt.09 Rw. 03 Kel. Pematang Kandis, Bangko - JAMBI Tel: 0746 21508; Fax: 0746 322178 Alamat Kantor lapangan: Jl. Sri Soedewi Lrg. Karya Bhakti No. 4 RT ½, Kabupaten Bungo, Jambi Tel: 0747 21992	Peserta - NGO
145. WATALA Lampung	Rozi Watala - Lampung	Peserta - NGO
146. World Bank	Chris P.A. Bennett World Bank Jakarta Stock Exchange Bldg, 12th floor Jl. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Tel: 021 52993000 Fax: 021 52993111 E-mail: cpabenn@attglobal.net cbennett1@worldbank.org	Peserta - Donor
147. World Neighbors Bali World Neighbors Southeast Asia Regional Office	Ilya Moeliono Studio Driya Media Bandung Jl. Ancol Timur XIV NO.1 Bandung, Jawa Barat Tel: 022 5202471, HP 08122002041 Tel/Fax: 022 5228273 P.O. Box 71, Ubud, Bali 80571, Indonesia Tel: 0361 975707 Fax: 0361 976487 E-mail: wnsea@dps.centrin.net.id	Peserta - NGO
148. Yayasan Gita Buana	Eddy Harfia Surma Yayasan Gita Buana, Jl. Ir. H. Juanda No. 01 RT. 07 / RW. 22, Kelurahan Simp. III Sipin Telanaipura, Jambi 36126 Tel/Fax: 0741 669644 E-mail: ygb@Jambi.wasantara.net.id	Peserta - NGO

149. Yayasan Gita Buana	Marzoni Fasilitator lapangan, d/a Jl. Semagi, Lorong Saiyo No. 42, RT23/8 Kelurahan Bungo Timur, Muara Bungo, Jambi Tel: 0747 323571	Peserta - NGO
150. Yayasan Kemala	Yones Pellokila Program Officer, Yayasan Kemala Perkantoran Ratu Plaza Lantai 17 Jl. Sudirman 9, Jakarta Tel: 021 7209596 Fax: 021 7297845 E-mail: yaskemala@cbn.net.id	Peserta - NGO
151. Yayasan Leuser Lestari (YLL)	Fachrurrazi Ch. Malley Ketua, Yayasan Leuser Lestari (YLL) Jl. Samanhudi Lk.IV/19, Polonia Medan, Sumatera Utara 20152 Fax: 061 4534364 E-mail: sangkala@indosat.net.id	Peserta - NGO
152. Yayasan PADI	Kusnadi Wirasaputra Yayasan PADI Indonesia Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya, Rt. 07/Rw. 02 No. 16, Kel. Damai, Balikpapan 76114 Tel/Fax: 0542- 426118 E-mail: padi_ind@indo.net.id	Peserta - NGO
153. Yayasan PADI	Amin Jafar Fasilitator lapangan, Yayasan PADI Indonesia Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya, Rt. 07/Rw. 02 No. 16, Kel. Damai, Balikpapan 76114 Tel/Fax: 0542- 426118 E-mail: padi_ind@indo.net.id	Peserta - NGO
154. Yayasan Puti Jaji	Hermanus Kancilius Manager Program Peningkatan kesadaran kritis, Lembaga Bina Benua Puti Jaji Jl. Siti Aisyah No. 50, RT 06 Kel. Teluk Lerong Ilir Samarinda 75128 Telp/fax: 0541 747560 E-mail: benua@samarinda.org	Peserta - NGO
155. YLBH Nusra (Sikka)	Samuel Saosabo YLBH Nusra Jl. Yos Soedarso No. 7, Maumere, Flores Telp. 0382 22225	Peserta - NGO
156. YP2MD (Yayasan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa) - NTB	Muttakun YP2MD, Jl. Sultan Hasanudin No. 33 Karijawa, Dompu, Nusa Tenggara Barat Tel. 0373 623027 Fax: (0373) 22884 (wartel)	Peserta - NGO

157. YTM (Yayasan Tanah Merdeka)	Arianto Sangaji Yayasan Tanah Merdeka Jl. Tanjungmanimbaya No. 111 B, Palu Tel/Fax: 0451-425892 E-mail: hinoe@palu.wasantara.net.id	Peserta - NGO
158. Yayasan Adudu Nantu International (YANI)	Idrus Labantu Yayasan Adudu Nantu International Gorontalo	Peserta - NGO
159.	Anne Casson	Peserta - Personal
160.	Nick Mawdsley	Peserta

ORGANIZING COMMITTEE

161. CIFOR	Linda Yuliani Rahayu Koesnadi Dina Juliarti Hubudin Yani Saloh Nurjanah Kambaruddin Purnomo Djatmiko Jl. CIFOR, Situgede, Sindangbarang Bogor 16680 Tel: 0251 622622 Fax: 0251 622100 E-mail: cifor@cgjar.org	OC - CIFOR
162. LATIN	Happy Tarumadevyanto Sheilla Alin Fitriyani M. Djauhari Nina Aji Asih Fadli lin Jl. Sutura Gg. Parkit No. 31 RT. 01/03 Desa Situ Gede, Sindang Barang Jero Bogor Barat Tel: 0251 420522-23 Fax: 0251 626593	OC - LATIN
163. Departemen Kehutanan Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)	Sri Hartati Erna Rosdiana Noviar Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 12 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Tel: 021 5730110	OC - DEPHUT

LAMPIRAN 4. Jadwal Lokakarya

WAKTU	KEGIATAN	TUJUAN
Hari I		
09.00 - 09.30	Pembukaan oleh David Kaimowitz (CIFOR)	Memberi pengantar tentang perkembangan sosial forestri di dunia
09.30 - 12.00	Diskusi Panel Pembicara: 1. San Afri Awang (UGM) 2. Sombolinggi (Masyarakat Tana Toraja) 3. Sutrisno (RLPS, Dephut) 4. Ary Yasir (Kepala Dishut Kutai Barat) 5. Bambang Adji (Perum Perhutani) Moderator: Wimar Witoelar	Mendiskusikan dan membandingkan konsep dengan kebijakan, dan implementasi sosial forestri di lapangan. Identifikasi masalah-masalah sosial forestri
13.00 - 15.00	Diskusi kelompok tentang inisiatif sosial forestri	Membuat daftar inisiatif sosial forestri yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dijawab oleh inisiatif sosial forestri.
15.30 - 17.00	Presentasi hasil diskusi kelompok	
Hari II		
09.00 - 12.00	Seminar perjalanan sosial forestri di Indonesia : Pembicara: 1. Muslimin Nasution (Mantan Menteri Kehutanan) 2. Nancy Peluso (University of California) Moderator: Iwan Tjitradjaja (P3AE UI)	Mencermati dan mengkritisi perkembangan inisiatif sosial forestri Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan inisiatif sosial forestri
13.00 - 15.00	Diskusi kelompok: 1. Kebijakan nasional yang tidak searah 2. Desentralisasi dan kejelasan ruang kelola masyarakat 3. Keselarasan kerja para inisiator 4. Penguatan institusi masyarakat setempat	Mendiskusikan strategi untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada sesi-sesi sebelumnya
15.30 - 17.00	Lanjutan diskusi kelompok	
Hari III		
09.00 - 11.00	Presentasi hasil diskusi kelompok	Mempresentasikan strategi pengembangan sosial forestri kepada peserta, yang sekaligus dihadiri oleh para pejabat tinggi Departemen Kehutanan

11.00 - 13.00	Komentar dari pihak Departemen Kehutanan: 1. Wahjudi Wardojo (Sekjen Dephut) 2. Suhariyanto (Dirjen BPK) 3. Hadi Pasaribu (Kepala Litbang Dephut) Moderator: Diah Rahardjo	Meminta tanggapan pihak Departemen Kehutanan atas masalah-masalah yang diungkap dan strategi penyelesaiannya
14.00 - 16.00	Diskusi rencana tindak lanjut Moderator: San Afri Awang	Mendiskusikan rencana tindak lanjut lokakarya
16.00 - 17.00	Penutupan	